

**GAMBARAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TAHUN ANGGARAN 2010-2013
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA)**

Oleh :
Merry Angeline Endoh
NIM : 232010182

KERTAS KERJA

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi**

**FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015**



FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60
Tlp: (0298) 321212, 311881
Salatiga , 50711 - Indonesia
Fax. (0298) – 21433

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merry Angeline Endoh

NIM : 232010182

Program Studi : Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi:

Judul : Gambaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun anggaran 2010 - 2013

(Studi kasus Pemerintahan Kota Salatiga)

Pembimbing 1 : Birgitta Dian Saraswati, SE., M.Si

Pembimbing 2 : David Adechandra. A . Pesudo, SE., M.Ak

Tanggal diuji : 31 Juli 2015

adalah benar-benar karya saya.

Di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Salatiga, 1 Juli 2015

Yang memberi pernyataan,



Merry . Angeline. Endoh



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Merry Angeline Endoh
NIM : 23 2010 182 Email : merryangeline@gmail.com
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi
Judultugasakhir : Gambaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 – 2013
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Salatiga)
Pembimbing : 1. Birgitta Dian Saraswati, SE, ,M.Si
2. David .A.A .Pesudo, SE, ,M.Ak

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran / terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian / implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 21 Agustus 2015



Tanda tangan saya
(Merry - Angeline - Endoh)

**GAMBARAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TAHUN ANGGARAN 2010-2013
(STUDI KASUS PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA)**

Oleh :
Merry Angeline Endoh
NIM : 232010182

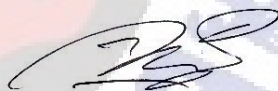
KERTAS KERJA

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi

**FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

Disetujui oleh:


Birgitta Dian Saraswati, SE., M.Si
Pembimbing 1


David A. A. Pesudo, SE., M.Ak
Pembimbing 2

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 - 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Merry Angeline Endoh
NIM : 23 2010 182 Email : merryangeline@gmail.com
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi
Judul tugas akhir : Gambaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 - 2013
(Studi Kasus Pemerintahan Kota Salatiga)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas - Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah kedalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah kedalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak *copyright* atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampirkan dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 21 Agustus 2015

1956

Merry Angeline Endoh

Tandatangan dan materai mahasiswa

Mengetahui,

Birgitta Dian Saraswati, SE, M.Si

Tandatangan dan materai pembimbing I

David A. A. Pesudo, SE, M.Ak

Tandatangan dan materai pembimbing II

MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
(Amsal 1:7)

Tetapi seperti ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
dan tidak pernah didengar oleh telinga,
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang
disediakan Allah untuk mereka
yang mengasihi Dia"
(1 Korintus 2:9)

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya
(Matius 21:22)

Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan
pengharapan
(Roma 5:4)

ABSTRACT

The evaluation on DAK management is needed to identify the existed problems and obstacles. The subjects of the research were DPPKAD, Department of Education, Department of Health and Office of Highways. The data used in the research was the secondary data (DAK Realization Statement in 2010 – 2013 and former data of DAK in 2010 – 2012) and primary data (interview with DPPKAD, Department of Education, Department of Health, and Office of Highways). The DAK realization statement was analyzed by variant of analyses and revenue growing analysis to value the DAK performance and the DAK growth realization from 2010 to 2013. Meanwhile, the result of the interview was evaluated using a comparison between the DAK management procedure on the rules and the realization in Salatiga. This study found that the DAK management in Salatiga has been in accordance with the laws and regulations. Futhermore, this study found that sector of Health has a better management among the three sectors. And then there is also few problems occurred/found in the DAK realization, such as the lack of coordination between the central government and the province government and lack of performance of DAK for second step realization.

Keywords: DAK, APBD, Performance, and Realization



SARIPATI

Evaluasi pada pengelolaan DAK diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang ada. Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder (Laporan Realisasi DAK tahun anggaran 2010 – 2013 dan data eks DAK tahun anggaran 2010 – 2012) dan data primer (wawancara dengan DPPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Laporan realisasi DAK dianalisis menggunakan analisis varians dan analisis pertumbuhan pendapatan untuk menilai kinerja DAK dan realisasi pertumbuhan DAK dari tahun 2010-2013. Sedangkan hasil wawancara dievaluasi menggunakan perbandingan antara prosedur pengelolaan DAK pada peraturan dengan realisasi di Kota Salatiga. Dari hasil wawancara terlihat bahwa pengelolaan DAK di Kota Salatiga telah sesuai dengan peraturan. Diantara ketiga Bidang DAK yang pengelolaannya lebih baik terdapat pada Bidang Kesehatan. Selain hal tersebut, secara umum ada beberapa kendala dalam realisasi DAK seperti, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan tidak optimalnya kinerja DAK untuk realisasi DAK untuk penyaluran DAK di tahap kedua.

Kata kunci : DAK, APBD, Kinerja, Realisasi

KATA PENGANTAR

DAK merupakan salah satu komponen dalam dana perimbangan yang berperan penting dalam pembangunan prasarana dasar dan menyediakan sarana dasar di setiap daerah. Untuk itu pengelolaan DAK yang baik sangat diperlukan untuk setiap daerah agar dapat merasakan pelayanan sarana dan prasarana umum yang baik dari pemerintah. Pengelolaan DAK harus dievaluasi guna mengidentifikasi masalah / kendala yang muncul dan dapat mengganggu proses pengelolaan DAK.

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian mengenai Gambaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2010 – 2013 (Studi Kasus Pemerintahan Kota Salatiga). Skripsi ini merupakan karya penulis, sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis mengharapkan saran, kritik, dan koreksi yang membangun terhadap kekurangan skripsi guna perbaikan penelitian serupa di kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Salatiga, 1 Juli 2015

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada Tuhan, atas anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Gambaran Pengelolaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2010 – 2013 (Studi Kasus Pemerintah Kota Salatiga)” ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun terkait penulisan dan penyajian skripsi ini untuk kemajuan bersama.

Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan moril maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Hari Sunarto, SE, MBA, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
2. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE, MBA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
3. Ibu Birgita Dian Saraswati, SE., M.Si dan Bapak David. A.A.Pesudo, SE.,M.Ak., selaku dosen pembimbing saya terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran, serta petunjuk Beliau dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
4. Seluruh dosen UKSW yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta seluruh civitas akademika UKSW.
5. Seluruh keluarga besar penulis, papa, juga kakak, yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moril dan materiil.
6. Teman - teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
7. Bapak Adrik staf di DPPKAD, Bapak Riri dan Ibu Lisa staf di Dinas Pendidikan, Bapak Mul dan Ibu Lina staf di Dinas Kesehatan, dan Bapak Hari staf di Dinas Bina Marga, terima kasih atas bantuan dan data – data yang diberikan..
8. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Semoga segala budi baik dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Salatiga, 1 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN AKSES..... | vi |
| ABSTRACT..... | vii |
| SARIPATI..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| DAFTAR GLOSARIUM..... | xv |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 3 |
| Dana Alokasi Khusus | 3 |
| Pengelolaan DAK..... | 4 |
| Peraturan – Peraturan yang mengatur Pengelolaan DAK dan Evaluasinya | 10 |
| METODE PENELITIAN..... | 12 |
| Jenis dan Sumber Data | 12 |
| Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data | 12 |
| ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN | 16 |
| Gambaran Umum Objek Penelitian | 16 |
| Analisis Data Laporan Realisasi DAK Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 -2013..... | 17 |
| Analisis Data Laporan Realisasi DAK Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan Pemerintah Kota Salatiga | 19 |
| Prosedur Penganggaran / Perencanaan DAK..... | 23 |

| | |
|--|----|
| Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Pemerintah Kota Salatiga | 25 |
| Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan | 26 |
| Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan | 27 |
| Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan | 28 |
| Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban DAK | 29 |
| Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban eks DAK | 30 |
| Prosedur Evaluasi dan Pengawasan DAK | 31 |
| PENUTUP | 34 |
| Kesimpulan | 35 |
| Keterbatasan | 35 |
| Saran | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | 37 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 39 |
| LAMPIRAN | 40 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Proses Penentuan dan Alokasi DAK..... | 6 |
| Tabel 2 Penyaluran DAK..... | 8 |
| Tabel 3 Bidang dan Dinas yang menerima dan mengelola DAK..... | 16 |
| Tabel 4 Analisis Tren dan Kinerja DAK Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 - 2013..... | 18 |
| Tabel 5 Analisis Tren dan Kinerja DAK Bidang Pendidikan Pemerintahan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 -2013..... | 19 |
| Tabel 6 Analisis Tren dan Kinerja DAK Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 - 2013..... | 21 |
| Tabel 7 Analisis Tren dan Kinerja DAK Bidang Infrastruktur Jalan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 – 2013..... | 22 |
| Tabel 8 Data Penggunaan Eks DAK Tahun Anggaran 2010 – 2013..... | 31 |
| Tabel 9 Evaluasi dan Analisis Gambaran Pengelolaan DAK..... | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | Panduan Wawancara..... | 41 |
| Lampiran 2 | Laporan Realisasi DAK tahun anggaran 2010 - 2013..... | 43 |
| Lampiran 3 | Laporan Penggunaan Sisa Dana DAK tahun 2010 - 2012 | 47 |
| Lampiran 4 | Gambaran alur penganggaran DAK dalam APBD..... | 49 |
| Lampiran 5 | Realisasi Penyaluran DAK..... | 50 |



Daftar Glosarium

| | |
|----------------|---|
| APBD | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Bappeda | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Bappenas | : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| BD | : Bobot Daerah |
| BDRS | : Bank Darah Rumah Sakit |
| BPS | : Badan Pusat Statistik |
| BT | : Bobot Teknis |
| DAK | : Dana Alokasi Khusus |
| DAU | : Dana Alokasi Umum |
| DBH | : Dana Bagi Hasil |
| DJPk | : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan |
| DPA | : Dokumen Pelaksana Anggaran |
| DPPKAD | : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| Eks DAK | : Sisa Pagu DAK (Sisa DAK yang tidak dapat digunakan selama tahun anggaran berlangsung, dan baru dapat digunakan di tahun selanjutnya) |
| E - Katalog | : <i>Electronic Catalogue</i> (digunakan untuk pemesanan jenis - jenis obat, berdasarkan pabrik - pabrik yang menjadi rekanan Pemerintah) |
| ICU | : <i>Intensive Care Unit</i> |
| IFN | : Indeks Fiskal Neto |
| IFW | : Indeks Fiskal Wilayah |
| IGD | : Instalasi Gawat Darurat |
| IKK | : Indeks Kemahalan Konstruksi |
| IKW | : Indeks Karakteristik Wilayah |
| IPL | : Instalasi Pengelolaan Limbah |
| Juklak | : Petunjuk Pelaksanaan |
| Juknis | : Petunjuk Teknis |
| Kepres | : Surat Keputusan Presiden |
| LH | : Lingkungan Hidup |
| Musrengbang | : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional |
| P2S | : Panitia Pembangunan Sekolah |
| Perda / Juklat | : Peraturan Daerah |
| Permendagri | : Peraturan Menteri Dalam Negeri |
| Perwali | : Peraturan Walikota |
| PL | : Penyehatan Lingkungan |
| PMK | : Peraturan Menteri Keuangan |
| PONEK | : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif |

| | |
|-----------|---|
| POS | : Prosedur Operasional Standar |
| Puskesmas | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| Pustu | : Puskesmas Pembantu |
| RAB | : Rencana Anggaran Biaya |
| RCI | : <i>Road Condition Indeks</i> |
| RKA | : Rencana Kegiatan Anggaran |
| RKPD | : Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| RKUD | : Rekening Kas Umum Daerah |
| RKUN | : Rekening Kas Umum Negara |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SKPD | : Satuan Kerja Pemerinrah Daerah |
| SMA / SMK | : Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| SP2D | : Surat Perintah Pencairan Dana |
| TAPD | : Tim Anggaran Pemerintah Daerah |
| UKBM | : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia |
| UTDRS | : Unit Transfusi Darah Rumah Sakit |

LATAR BELAKANG

Pada saat ini paradigma pembangunan nasional oleh pemerintah tidak lagi mengenai pertumbuhan. Paradigma tersebut berangsur – angsur berubah ke arah paradigma pembangunan yang secara adil dan berimbang di setiap pemerintahan daerah. Kondisi ini membuat pemerintah pusat (negara) harus memberikan wewenang khusus bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan - peraturan melalui otonomi daerah. (Gribaldi, 2008)

Menurut UU No.32 tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Agar fungsi pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan mandiri diperlukan adanya sumber penerimaan yang cukup bagi daerah, untuk itu diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan undang - undang yang berlaku. Pada peraturan pemerintah pasal 4 nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Daerah yang mampu melakukan pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunannya.

Dalam APBD terdapat pendapatan daerah, berupa dana perimbangan yang di *transfer* dari pemerintah pusat. Menurut UU No.32 tahun 2004 pasal 159, dana perimbangan sebagaimana dimaksud terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional; dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (UU No.32 tahun 2004 pasal 162 point 1).

DBH, DAK, dan DAU memiliki tujuan sama yaitu untuk pembangunan secara adil dan merata. DBH adalah dana yang bersumber dari total penerimaan pajak dan sumber daya alam di berbagai daerah. Sedangkan DAK dan DAU memiliki perbedaan yang terletak pada pengalokasian dananya. DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat yang sesuai dengan prioritas nasional atau yang di usulkan dari daerah tertentu tersebut. Sedangkan DAU pengalokasiannya berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan pada APBN (UU no.32 tahun 2004 pasal 159-162). Pada penelitian ini peneliti mengambil topik tentang DAK, karena DAK memiliki peranan penting dalam pembangunan dasar pemerintah daerah, selain itu juga karena di Kota Salatiga terdapat permasalahan terkait pengelolaan DAK.

Pada data yang diambil dari BPS Kota Salatiga, panjang jalan raya di seluruh wilayah Kota Salatiga pada tahun 2011 menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga mencapai 654.211,21 meter (BPS,2012: 207). Data dari Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Salatiga, hanya 50 % dari 654.211,21 meter jalan di Kota Salatiga yang dikatakan baik (BPS, 2012: 211). Hal ini menunjukkan masih adanya sistem dalam pengelolaan Infrastruktur Jalan yang belum baik di Kota Salatiga, dikarenakan adanya kemungkinan pengelolaan DAK yang kurang baik.

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Bapak Adrik, bagian administrasi DPPKAD, secara tidak langsung pengelolaan DAK di Kota Salatiga berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya di dalam Laporan Realisasi DAK, realisasi DAK tidak berjalan dengan baik. Dari sekian jumlah pagu / anggaran DAK yang dapat direalisasikan hanya 60% nya.¹ Hal itu dibuktikan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan melakukan analisis pada Laporan realisasi DAK tahun 2010 - 2013 yang diberikan oleh DPPKAD, bahwa benar adanya anggaran DAK belum dapat direalisasikan dengan baik.

Dari data BPS dan hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Adrik, staf DPPKAD, dapat dikatakan pengelolaan DAK di Pemerintahan Kota Salatiga

¹ Wawancara dengan Bapak Adrik (Bagian Administrasi) di Kantor DPPKAD

mengalami permasalahan. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat gambaran pengelolaan DAK dengan melakukan evaluasi pada pengelolaan DAK agar setiap proses pengelolaan DAK yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dan kembali lagi ke pemerintah pusat berjalan dengan baik. Evaluasi penting untuk DAK karena berguna untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan DAK (Permenkes no.55 tahun 2012). Untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin mencoba melihat gambaran pengelolaan DAK dengan melakukan evaluasi pada pengelolaan DAK di Kota Salatiga.

Untuk melakukan penelitian, peneliti hanya berfokus pada tiga dari dua belas bidang penerima DAK terbesar yang di terima oleh Pemerintah Kota Salatiga, yaitu: Bidang Pendidikan, Infrastruktur Jalan, dan Kesehatan. Tiga Bidang tersebut memiliki proporsi anggaran terbesar di Kota Salatiga

Dari seluruh pembahasan diatas maka rumusan persoalan penelitian ini : Bagaimana realisasi pengelolaan DAK secara riil pada ketiga Bidangterkait DAK yaitu pada Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan Bidang Infrastruktur Jalan di Pemerintah Kota Salatiga dilihat dari pertumbuhan realisasi DAK dan kesesuaian dengan aturan terkait DAK.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pengelolaan DAK di Kota Salatiga dengan melakukan analisis dan evaluasi pada pengelolaan DAK, menemukan kelemahan pengelolaan DAK di Kota Salatiga, serta memberikan saran bagi perbaikan praktek pengelolaan DAK di Kota Salatiga

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dialokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas

nasional; dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. (UU No.32 tahun 2004 pasal 162 point 1).

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigrasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi, Prasarana pemerintah daerah, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sarana Perdagangan, Sarana dan Prasarana daerah tertinggal, Energi perdesaan, Perumahan dan Pemukiman, Keselamatan Transportasi darat, Transportasi pedesaan, serta Sarana dan Prasarana kawasan perbatasan. (PMK No. 201/PMK 07/2012).

Dengan kata lain DAK adalah dana yang diberikan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dasar bagi setiap daerah, guna mencapai pemerataan di setiap daerah, yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditentukan pemerintah pusat atau berdasarkan kegiatan khusus yang diusulkan pemerintah daerah.

2.2 Pengelolaan DAK

Pengelolaan DAK adalah seluruh kegiatan DAK, yang mencakup perencanaan, penetapan alokasi, penggunaan dan penyaluran, juga evaluasi. Kegiatan tersebut dimulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dan kembali lagi kepada pemerintah pusat. Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Perencanaan (Penganggaran) DAK dan Penetapan alokasi DAK

Sesuai dengan tujuan DAK perencanaan dan penetapan alokasi DAK ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah dimungkinkan untuk berperan untuk pengajuan usul kegiatan DAK dalam Musrenbang. Bappenas menentukan target penentuan sektor mana yang akan menerima DAK dengan acuan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, dan kementerian teknis terkait sektor tersebut nantinya akan menetapkan program yang sesuai dengan prioritas nasional pada sektor tersebut. Pemerintah pusat hanya aktif dalam menetapkan

proses alokasi DAK dan berperan dalam penentuan anggaran DAK. Untuk tahap pengelolaan DAK lainnya dikelola langsung oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku. (Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia, 2013)

Dalam hal penetapan alokasi, pemerintah pusat menentukan pemerintah daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) Kriteria umum, yang berpatokan pada indeks fiskal neto; (2) Kriteria khusus, berdasarkan peraturan perundangan; dan (3). Kriteria teknis, berdasarkan indeks teknis bidang terkait (UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004)

Kriteria umum berasal dari hasil pertimbangan akan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah dengan prioritas pada daerah yang pendapatannya dan belanja pegawainya negatif atau di bawah rata – rata nasional. Kriteria khusus diberikan kepada daerah otonomi khusus, yaitu : daerah pantai, perbatasan, dll. Kriteria teknis menurut ketentuan dari pertimbangan menteri teknis yang didasarkan pengukuran yang mencerminkan kondisi sarana dan prasarana pada bidang terkait. (Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia, 2013)

Didalam alokasi DAK terdapat perhitungan alokasi yang digunakan untuk menentukan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Perhitungan tersebut didasarkan pada pengukuran dan penentuan jumlah / bobot masing-masing kriteria. Pada kriteria umum ditentukan oleh kementerian keuangan, sedangkan untuk kriteria khusus dan kriteria teknis ditentukan oleh kementerian teknis. Besaran alokasi DAK untuk setiap daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). (Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia, 2013)

Tabel berikut menjelaskan alur proses penentuan alokasi DAK secara lebih rinci berdasarkan riset Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Tabel 1
Proses Penentuan Alokasi DAK untuk Kabupaten / Kota

| | |
|-----------|--|
| 1. | Penentuan kabupaten/kota yang berhak menerima DAK berdasarkan indeks fiskal netto (IFN) atau kemampuan keuangan suatu daerah ($IFN < 1$ otomatis daerah berhak menerima). Langkah ini termasuk ke dalam kriteria umum. |
| 2. | Apabila ada sebuah kabupaten / kota yang tidak memenuhi kriteria umum namun memenuhi salah satu kriteria dari kriteria khusus, yaitu otonomi khusus (otsus) dan daerah tertinggal sebagaimana tercantum dalam undang-undang, seperti Provinsi NAD dan Provinsi Papua (untuk tahun 2007, hanya Papua), daerah tersebut secara otomatis berhak mendapat DAK. |
| 3. | Jika daerah dimaksud tidak termasuk ke dalam wilayah Provinsi NAD atau Provinsi Papua, daerah itu harus melalui proses penentuan berdasarkan langkah kedua kriteria khusus, yakni karakteristik wilayah seperti daerah pesisir, daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, daerah terpencil, daerah yang rawan banjir dan tanah longsor, daerah rawan pangan dan, sejak tahun 2007, daerah pariwisata. Karakteristik wilayah tadi masuk ke dalam indeks karakteristik wilayah (IKW). |
| 4. | Menggabungkan IFN (setelah dikonversi sesuai dengan arah IKW) dan indeks karakteristik wilayah untuk mendapatkan indeks fiskal dan wilayah (IFW). |
| 5. | Jika nilai IFW suatu kabupaten/kota lebih dari 1, kabupaten/kota tersebut secara otomatis berhak menerima DAK (walaupun berdasarkan kriteria umum daerah tadi tidak berhak). Apabila nilai IFW suatu daerah kurang dari 1, daerah tersebut tidak berhak menerima DAK. |
| 6. | Daerah yang berhak menerima DAK adalah daerah yang memenuhi langkah pertama ($IFN < 1$) atau langkah kedua (kabupaten/kota berada pada wilayah provinsi NAD atau Papua, meskipun $IFN > 1$), atau memenuhi langkah kelima, yaitu $IFW > 1$. |
| 7. | Menghitung bobot daerah (BD) dengan cara mengalikan indeks fiskal dan wilayah (IFW) dengan indeks kemahalan konstruksi (IKK). |
| 8. | Untuk seluruh kabupaten/kota, kementerian teknis menghitung indeks teknis |

| | |
|------------|---|
| | untuk tiap sektor yang akan menerima DAK. |
| 9. | Menghitung bobot teknis (BT) dengan cara mengalikan indeks teknis dengan IKK |
| 10. | Menentukan bobot DAK berdasarkan hasil dari penggabungan BD dan BT. |
| 11. | Setelah mendapatkan bobot DAK, Kemenkeu kemudian menentukan jumlah DAK untuk tiap kabupaten/kota. |
| | Keterangan: Alur ini disusun berdasarkan hasil analisis beberapa peraturan yang berkaitan dengan DAK dan hasil wawancara dengan kementerian terkait |

Sumber :Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia, (2013)

- Penggunaan DAK dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui Dinas – Dinas terkait. pemerintah pusat berperan pasif terhadap penggunaan DAK. Namun pemerintah pusat (Kementrian per Bidang) mengatur setiap jalannya penggunaan DAK dengan menetapkan Juknis di setiap tahunnya berdasarkan data pembangunan daerah yang di berikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya menerima laporan dari tiap daerah dan melakukan *transfer* DAK sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

Arah Kebijakan penggunaan DAK pada ketiga Bidang DAK yang menjadi objek penelitian berdasarkan Petunjuk Teknis dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07/2012 :

- 1) Bidang pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan dasar yaitu DAK untuk SD (Sekolah Dasar), DAK untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama), serta DAK untuk pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). DAK untuk SMP mulai dialokasikan tahun 2012 sedangkan alokasi DAK untuk Pendidikan SMA dan SMK dimulai tahun 2013. Untuk DAK sektor Pendidikan, terdapat kegiatan yang berbentuk kegiatan fisik dan juga jenis kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan.

2) Bidang Kesehatan, dialokasikan untuk pelayanan dasar, pelayanan rujukan, dan bidang kefarmasian. Perbedaan antara kegiatan untuk pelayanan dasar dan pelayanan rujukan lebih pada jenis penyedia layanannya. Pelayanan dasar digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Pustu (Puskesmas Pembantu). Sedangkan untuk pelayanan rujukan digunakan bagi rumah sakit. Bidang Kefarmasian digunakan untuk penyediaan obat – obatan dasar bagi Puskesmas dan Pustu.

3) Bidang infrastruktur jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi, Kabupaten dan Kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan antar wilayah (*domestic connectivity*) dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

- Penyaluran DAK dilakukan dengan memindahkan rekening dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Akun transaksi *transfer* tersebut didasarkan pada basis kas dan tidak berdasarkan pengeluaran. Terdapat tahap – tahap dan prosedur penyaluran DAK, yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Setiap penyaluran DAK harus mengikuti prosedur – prosedur baku yang ada di dalam peraturan tersebut, yang di rangkum di dalam tabel di berikutini.

Tabel 2
Tahap dan Prosedur Penyaluran DAK

| | |
|-----------|--|
| A. | Penyaluran disalurkan dalam 3 tahap pertama 30%, kedua 45%, dan ketiga 25%. |
| B. | Penyaluran DAK tidak bisa dilakukan setelah satu tahun fiskal. |
| C. | Penyaluran DAK dilakukan setelah dokumen yang diminta diterima DJPK. Penyaluran tahap pertama paling cepat adalah pada bulan Februari. |
| D. | Dokumen yang harus diserahkan untuk pencairan DAK tahap pertama adalah sebagai berikut : |
| a). | Penyampaian Perda APBD |

| | |
|-----------|---|
| | b). Realisasi DAK dan laporan kegiatan DAK tahun lalu |
| | c). DAK realisasi laporan tahap ketiga tahun lalu |
| | d). SP2D rekap pada tahap ketiga DAK tahun lalu |
| | e). Surat pernyataan untuk dana pendampingan DAK tahun berjalan. |
| E. | Dokumen yang diserahkan untuk pencairan DAK tahap kedua adalah sebagai berikut: |
| | a). Laporan penyerapan DAK tahap pertama tahun berjalan |
| | b). SP2D rekap DAK tahap kedua tahun berjalan. |
| F. | Dokumen yang diserahkan pencairan DAK tahap tiga : |
| | a). Laporan penyerapan DAK tahap kedua tahun berjalan |
| | b). SP2D rekap DAK tahap kedua tahun berjalan |
| G. | Laporan penyerapan DAK tahap pertama dan tahap kedua dapat dilakukan setelah penggunaan dana DAK sama atau lebih dari 90% dari jumlah DAK yang telah diterima. |
| H. | Laporan penyerapan DAK tahap pertama dan kedua dapat disampaikan paling lambat 7 hari sebelum akhir tahun fiskal. Jika laporan disampaikan terlambat, maka sisa dana tidak akan ditransfer. |
| I. | Semua dokumen prasyarat di kertas kop surat harus ditandatangani oleh kepala daerah dan dicap basah. Semua dokumen yang diserahkan harus dokumen asli yang ditambahkan dengan softcopy dari laporan excel (proses laporan yang di kirim) |

Sumber: Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia (2013)

- Evaluasi dan Pengawasan pada DAK, terjadi pada saat selesainya kegiatan pengelolaan DAK dari perencanaan – pelaporan DAK. Evaluasi dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga dari segi teknis (Menteri teknis) dan keuangan DAK (Menteri Keuangan) terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan Menteri / Pimpinan lembaga masing-masing dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PMK / 2012).

2.3 Peraturan-peraturan yang mengatur Pengelolaan DAK dan Evaluasinya

Dalam pemamfaatan dan pengelolaan DAK, pemerintah daerah yang memperoleh alokasi DAK harus mengikuti berbagai regulasi dari pemerintah pusat, seperti Undang- Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan / Keputusan Menteri, Petunjuk teknis (Juknis) Menteri per Bidang dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian dan Lembaga, regulasi dari pemerintah pusat tersebut, antara lain:

1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU ini mengatur keuangan negara dalam bentuk APBN dan juga APBD berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. DAK terdapat dalam APBD pada komponen dana perimbangan, karena itu untuk pengelolaan DAK diperlukan untuk mengacu pada UU ini karena DAK nantinya akan dilaporkan dalam APBD.
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini mengatur perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan dibagi atas tiga pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Untuk DAK kegiatan pembangunan yang dilakukan menggunakan rencana pembangunan jangka menengah. Pada pengelolaan DAK diperlukan untuk mengacu pada peraturan ini, karena untuk pembangunan yang dilakukan menggunakan DAK mengacu pada peraturan ini.
3. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur jalannya pemerintahan daerah, DAK terdapat pada pasal 159-162. DAK berfungsi untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional.
4. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini mengatur APBD sebagai sarana perimbangan keuangan. DAK terdapat pada pasal 38 - 42. Pada UU ini mengatur penentuan kriteria - kriteria DAK yang disalurkan ke pemerintah daerah.
5. PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah mengatur mekanisme penggunaannya perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan juga DAK.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013. Peraturan ini dibuat oleh menteri keuangan, untuk mengatur alokasi DAK, dari jumlah alokasi DAK ke tiap Bidang dan daerah, lingkup kegiatan DAK, juga mengatur mekanisme penganggaran dan penyaluran DAK.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri nomor 73 tahun 2011 yang mengatur petunjuk teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada peraturan ini, berisi ketentuan pengelolaan DAK yang didasarkan pada peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan DAK, dengan tujuan meringkas setiap peraturan DAK untuk ketentuan pengelolaan DAK agar semakin mudah dilaksanakan.

8. Petunjuk Teknis (Juknis) merupakan peraturan dari pemerintah pusat (menteri teknis) yang berupa ketentuan pengelolaan DAK per Bidang teknis. Juknis dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan di setiap Bidang penerima DAK yang didasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Kementerian Teknis. Sesuai dengan pengertiannya Petunjuk teknis (Juknis) digunakan untuk mengatur pengelolaan DAK yang meliputi pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pengawasan untuk tiap Bidang yang menerima DAK.

9. Juklak (Perwali / Perda) merupakan peraturan yang ada di setiap daerah, guna mengatur jalannya pemerintahan daerah yang didasarkan pada Undang - Undang Negara, Surat Keputusan Presiden (Kepres) dan kebijakan dari kepala pemerintah daerah itu (Walikota / Kepala daerah). Setiap apapun kegiatan yang akan dilakukan dalam pemerintahan harus mengacu pada peraturan tersebut.

DAK juga harus mengacu pada Peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali), guna menjalankan kegiatan yang ada sesuai dengan kondisi daerah.

Peraturan - peraturan yang ini akan dijadikan oleh peneliti sebagai evaluator pengelolaan DAK yang berpatokan pada teori evaluasi menurut GAO yang diambil pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014), evaluasi merupakan sebuah proses untuk menaksir bagaimana program tersebut bekerja dengan baik,

dengan cara membandingkan antara tujuan atau target dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Evaluasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pengelolaan DAK antara peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan anggaran sebagai target kegiatan dengan kondisi secara riil di lapangan, secara khusus di Kota Salatiga.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari data laporan realisasi DAK tahun anggaran 2010 – 2013, dan data Eks DAK tahun anggaran 2010 - 2012 yang berasal dari DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah), serta peraturan terkait DAK yang diperoleh dari internet dan DPPKAD. Data primer dari penelitian ini berupa wawancara pada Dinas – Dinas terkait dengan pengelolaan DAK sesuai dengan tiga bidang yang menjadi fokus penelitian yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif studi kasus pada Pemerintah Kota Salatiga.

Menurut Winarta (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan yang berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti dan terjadi dilapangan.

Objek Penelitian

Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas Bina Marga, dan DPPKAD Pemerintahan Kota Salatiga.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

- Melakukan kajian litelatur, pada peraturan terkait DAK yang terdapat pada : UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan tahun 2009 - 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2010 - 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2012, Perwali Kota Salatiga tahun 2012 - 2013 dan Peraturan Menteri Teknis: Petunjuk teknis (Juknis) penggunaan DAK masing - masing Bidang yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga terkait tahun anggaran 2010 – 2013.

- Menganalisis kinerja dan realisasi pendapatan DAK berdasarkan anggaran dan realisasi belanja DAK yang terdapat pada Laporan realisasi DAK tahun 2010-2013. Analisis yang dilakukan digunakan untuk menilai apakah kinerja DAK dari tahun ke tahun sudah berjalan dengan baik atau belum, dan menilai pertumbuhan DAK selama 4 tahun anggaran semakin meningkat atau menurun, dan melihat penyebab dari turunnya DAK. Untuk menilai hal tersebut digunakan dua analisis pendapatan yaitu analisis varians (selisih) anggaran pendapatan untuk menilai kinerja DAK dan analisis pertumbuhan pendapatan untuk menilai realisasi pendapatan DAK.

Menurut Mahmudi (2010), Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah realisasi dengan yang di anggarakan, jika angka selisih antara anggaran dan realisasi mengalami selisih kurang (*unfavourable variance*) maka diperlukan analisa lebih lanjut, jika terjadi selisih lebih maka anggaran pendapatan di anggap baik, karena sesuai dengan target yang diinginkan.

Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang harus di perhatikan oleh pembaca laporan :

1. Menilai berapa besar selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar. Selisih kinerja dianggap wajar jika kinerja pendapatan DAK lebih dari 90%, sesuai dengan PMK no 183 tahun 2013 pasal 9 ayat 4.
2. Menilai signifikansi tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
3. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan.

Analisis pertumbuhan pendapatan bermamfaat untuk mengetahui dan melihat dalam tahun anggaran bersangkutan kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Analisis tersebut dihitung dengan rumus:

Pertumbuhan Pendapatan th t

$$= \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100 \%$$

- Melakukan wawancara secara mendalam pada tiga dinas yang menjadi fokus penelitian yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga dan DPPKAD untuk mengetahui proses dari pengelolaan DAK yang selama ini dilakukan pada ketiga dinas tersebut dan Pemerintah Kota Salatiga. Wawancara dilakukan kepada petugas yang secara khusus menangani DAK, pada bagian administrasi dan bagian pelaksanaannya. Prosedur wawancara yang didasarkan oleh Juknis dan peraturan yang berlaku. Dari wawancara tersebut akan dilihat bagaimana prosedur pada pengelolaan DAK yaitu perencanaan / penganggaran, penggunaan / pelaksanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban, serta evaluasi / pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pada wawancara tersebut dilihat juga apakah ada hambatan / kendala yang terjadi pada setiap pengelolaan DAK yang dilakukan pada tiap Dinas tersebut.
- Menganalisis data Laporan realisasi DAK yang sudah dibandingkan dengan peraturan – peraturan terkait DAK, bagaimana pertumbuhan DAK setiap tahunnya, dan angka tersebut apakah telah sesuai dengan angka yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Permendagri, dan juga Petunjuk teknis (Juknis). Setelah melihat kesesuaian antara laporan realisasi dengan peraturan – peraturan terkait DAK, kemudian menggabungkan hasil analisis dan hasil wawancara pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga. Hasil evaluasi dari analisis dan wawancara yang dilakukan dibandingkan lagi dengan peraturan-peraturan DAK.
- Mengambil kesimpulan dari setiap tahap evaluasi pada pengelolaan DAK bagaimana gambaran pengelolaan DAK di Pemerintahan Kota Salatiga apakah

sudah berjalan dengan baik atau tidak, dan menilai bagaimana Pemerintahan Kota Salatiga memanfaatkan DAK yang diterima dari pemerintah pusat.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Salatiga terletak antara 007°.17' dan 007°.17'.23" Lintang Selatan dan antara 110°.27'.56,81" dan 110°.32'.4,64" Bujur Timur. Terbagi atas 4 kelurahan, yaitu: Siderejo, Tingkir, Argomulyo, dan Sidomukti. Kota Salatiga memiliki 10 dinas didalamnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber daya air, Dinas Cipta Karya dan Tata ruang, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (BPS, 2012: 3-5, 23)

DAK diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga dan disalurkan ke berbagai Bidang. Selama tahun 2010 terdapat 10 Bidang yang menerima DAK, yaitu : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigrasi, Infrastruktur Air bersih, Infrastruktur Sanitasi, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan hidup, Keluarga berencana, dan Kehutanan. Di tahun 2011 Bidang yang menerima DAK meningkat menjadi 11 Bidang, ditambah dengan Bidang Keselamatan Transportasi darat, kemudian di tahun 2012 - 2014 bertambah lagi DAK untuk Bidang Pertanian menjadi 12 Bidang.

Terdapat tiga Dinas yang menjadi fokus penelitian, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga (mengelola DAK Bidang Infrastruktur Jalan). Berdasarkan Juknis setiap Dinas yang ada mengatur dan mengelola setiap DAK yang diterima berdasarkan anggaran tiap tahunnya dan sesuai dengan Petunjuk teknis pengelolaan DAK.

Tabel 3
Bidang dan Dinas yang Menerima dan Mengelola DAK
(berdasarkan Juknis yang berlaku)

| No | Bidang DAK | Dinas yang mengelola | Pengelolaan DAK yang dilakukan |
|----|------------|----------------------|--|
| 1 | Pendidikan | Dinas Pendidikan | Digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan dasar untuk SD,SMP, dan di tahun 2013 ditambah untuk SMA, seperti untuk perbaikan / rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, pengadaan peralatan pendidikan (seperti ruang laboratorium dan alat peraga). (Permendikbud No. 8 dan No.12 tahun 2012 / Petunjuk Teknis Pendidikan tahun anggaran 2013) |
| 2 | Kesehatan | Dinas Kesehatan | Digunakan untuk tiga kategori pelayanan utama dalam kesehatan, yaitu: untuk pelayanan kesehatan dasar seperti Pembangunan Puskesmas, Pustu, rehabilitasi Puskesmas / Pustu, penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan / pengadaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia). Kedua, untuk pelayanan kesehatan rujukan, yaitu untuk fasilitas tempat tidur kelas III di Rumah Sakit, pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), pemenuhan sarana prasarana dan peralatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit, prasarana dan peralatan <i>Intensive Care Unit (ICU)</i> , pelayanan darah / Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS), pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan pengadaan peralatan pendukungnya di Rumah Sakit. Ketiga, untuk pelayanan kefarmasian yang diperuntukan untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---|
| | | | pembangunan baru/rehabilitasi dan atau penyediaan sarana pendukung Instalasi farmasi Kabupaten / Kota, pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus pulau/satelit, dan penyediaan sarana pendukungnya. (Permenkes no.55 tahun 2012 / Petunjuk Teknis tahun anggaran 2012) |
| 3 | Infrastruktur Jalan | Dinas Bina Marga | Mengatur Infrastruktur Jalan, tetapi di daerah lain Dinas Pekerjaan Umum yang mengelola DAK Bidang Infrastruktur Jalan, Bina Marga merupakan salah satu bidang spesifiknya. DAK bidang ini dimanfaatkan untuk kegiatan penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan / jembatan pemeliharaan berkala / rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan. Ruas jalan provinsi dan Kabupaten / Kota yang dapat ditangani adalah ruas - ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur / Bupati / Walikota tentang penetapan ruas-ruas jalan sebagai jalan Provinsi dan jalan Kabupaten / Kota. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum / Petunjuk Teknis Pekerjaan Umum no 15/PRT/M/2010) |

4.2 Analisis Data Laporan Realisasi DAK Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2010-2013

Secara umum DAK dalam APBD hanya sejumlah 7 % dari total dana perimbangan yang di terima Pemerintah Daerah. Jumlah yang hanya 7% dari anggaran dana perimbangan diharapkan dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan analisis realisasi pendapatan DAK dan kinerja pendapatan DAK yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota

Salatiga. Analisis yang dilakukan pada pendapatan DAK menggunakan perhitungan analisis varians untuk menilai kinerja DAK, jika angka selisih antara anggaran dan realisasi mengalami selisih kurang (*unfavourable variance*) maka diperlukan penelaahan lebih lanjut. Kedua, menggunakan analisis pertumbuhan untuk menilai realisasi pertumbuhan DAK, jika pertumbuhan pendapatan negatif maka perlu dicari apa penyebab penurunannya (Mahmudi, 2010).

Tabel 4

**Analisis Realisasi Pendapatan dan Kinerja DAK Pemerintahan Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2010–2013**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------|
| Tahun | Pagu/Anggaran | Realisasi | % Realisasi Pertumbuhan DAK $= ((th - (th-1) / th-1) \times 100\%)$ | % Kinerja Pendapatan DAK $= (2-3) / 1 \times 100\%$ | Wajar / Tidak Wajar |
| 2010 | Rp 21.182.300.000 | Rp 14.057.314.722 | | 66,36% | Tidak Wajar |
| 2011 | Rp 23.540.600.000 | Rp 14.693.869.291 | 4,53% | 62,42% | Tidak Wajar |
| 2012 | Rp 27.639.760.000 | Rp 18.210.269.664 | 23,93% | 65,88% | Tidak Wajar |
| 2013 | Rp 28.398.410.000 | Rp 12.766.791.711 | -29,89% | 44,96% | Tidak Wajar |

Sumber: Data sekunder (Diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas persentase realisasi pertumbuhan DAK tahun 2010-2011 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,53%, di tahun 2011-2012 pertumbuhan positif sebesar 23,93%, tetapi pada tahun 2012-2013 realisasi pertumbuhan DAK mengalami pertumbuhan negatif sebesar 29,89%. Kinerja DAK pada tahun 2010 mengalami selisih kurang sebesar 66,36 %, pada tahun 2011 mengalami selisih kurang sebesar 62,42% dan dinilai tidak wajar. Pada tahun 2012 mengalami selisih kurang sebesar 65,88%. Di tahun 2013 mengalami selisih kurang sebesar 44,96 %. Kinerja DAK Pemerintahan Kota Salatiga dari tahun 2010-2013 dinilai tidak wajar, karena kinerja kurang dari 90%. Jika dilihat dari total pendapatan pagu DAK juga hanya menyerap rata-rata 60% dari total anggaran. Berdasarkan hasil wawancara pada DPPKAD kinerja DAK tahun 2013 yang mengalami selisih tidak wajar sebesar 44.96% dan pertumbuhan realisasi

negatif sebesar 29,89%, hal ini disebabkan karena pada tahap kedua realisasi DAK tidak sampai 90% dari total dana yang di *transfer*, sehingga DAK di tahap ketiga tidak di *transfer*, dan realisasi DAK yang digunakan hanya 44,96% dari anggaran.

4.2.1 Analisis Data Laporan Realisasi DAK pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan Pemerintahan Kota Salatiga

Untuk melihat penyebab kinerja DAK dari tahun 2010 – 2013 dapat mengalami selisih tidak wajar dan pengaruh realisasi pertumbuhan DAK yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2013, dilakukan analisis lebih dalam kepada ketiga Bidang terkait yang menjadi objek penelitian yaitu pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jalan.

Tabel 5
Analisis Realisasi Pendapatan dan Kinerja DAK Bidang Pendidikan
Pemerintah Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2010-2013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------|------------------|---|---|------------------------|
| Tahun | Pagu/Anggaran | Realisasi | % Realisasi Pertumbuhan DAK $= ((th - (th-1) / th-1) \times 100\%)$ | % Kinerja Pendapatan $((2-3)/1 \times 100\%)$ | Wajar / Tidak Wajar |
| 2010 | Rp 8.385.100.000 | Rp 2.341.823.459 | | 27,93% | Tidak Wajar |
| 2011 | Rp 8.559.200.000 | Rp 990.659.600 | -58,00% | 11,57% | Tidak Wajar |
| 2012 | Rp 5.958.580.000 | Rp - | -100,00% | 0,00% | Tidak Wajar |
| 2013 | Rp 2.893.365.000 | Rp 92.108.000 | 100% | 3,18% | Tidak Wajar |

Sumber : Data sekunder (Diolah)

Pada tabel DAK bidang pendidikan tahun 2010-2013, pertumbuhan realisasi DAK Bidang Pendidikan mengalami perkembangan yang negatif di tahun 2010-2011 sebesar 58%, karena di tahun 2010 banyak melakukan pembangunan dan rehab sekolah sedangkan pada tahun 2011 hanya digunakan

untuk rehab beberapa sekolah dan sarana jaminan mutu, pada tahun 2011-2012 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 100%, karena DAK tahun 2012 sama sekali tidak digunakan, dan di tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan positif sebesar 100% daripada di tahun sebelumnya.

Untuk kinerja DAK pada tahun 2010 sebesar 27,93%, pada tahun 2011 kinerja mengalami selisih kurang sebesar 11,57%, pada tahun 2012 kinerja mengalami selisih kurang sebesar 0,00%, karena pada tahun 2012 pagu sama sekali tidak digunakan untuk realisasi, dan pada tahun 2013 kinerja mengalami selisih kurang sebesar 3,18%. Kinerja DAK pada tahun 2010 – 2013 dikategorikan dalam tidak wajar, dan dari total pendapatan DAK hanya direalisasikan 15% dari pagu yang telah di *transfer*.

Penyebab DAK Bidang Pendidikan kinerja tidak dapat berjalan secara optimal, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Dinas Pendidikan, hal tersebut dikarenakan realisasi yang ada harus disesuaikan dengan anggaran kegiatan yang sudah ditentukan. Tetapi seringkali anggaran kegiatan yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan realisasi, contohnya untuk kegiatan perbaikan sekolah dan ruang kelas, didalam Juknis kriteria perbaikan minimal memiliki kerusakan sebesar 35% dari total biaya pembangunan gedung. Hal ini yang membuat Dinas kesulitan untuk menentukan kegiatan yang akan dianggarkan di tahun berikutnya karena di Kota Salatiga sulit untuk mencari sekolah yang mengalami kerusakan bangunan mencapai 35% dari total biaya pembangunan gedung. Kemudian Juknis DAK Bidang Pendidikan juga sering mengalami keterlambatan padahal Dinas harus menganggarkan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk tahun yang akan datang pada bulan September. Oleh karena itu di setiap tahunnya Dinas menganggarkan kegiatannya disesuaikan dengan Juknis di tahun sebelumnya. Setelah Juknis di tahun berikutnya keluar, Dinas akan membuat anggaran perubahan. Mekanisme anggaran perubahan yang dilakukan Dinas hanya merubah pada kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan pada tahun anggaran bersangkutan. Sekolah yang menerima DAK pun sering mengalami perubahan, karena ada ketidaksesuaian dengan kriteria pada Juknis di tahun selanjutnya.

Di dalam Laporan Realisasi DAK Dinas Pendidikan jauh dari target yang di tentukan dan mengalami selisih tidak wajar dan mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2012, DAK Bidang Pendidikan tidak digunakan sama sekali, karena kegiatannya seperti pembangunan sekolah tidak bisa di realisasikan pada penjaminan mutu (alat – alat peraga dalam laboratorium sekolah dan buku sekolah) tapi akan di realisasikan di tahun berikutnya.² Sisa anggaran / pagu DAK dapat direalisasikan di tahun berikutnya, tahun 2012. Sama halnya dengan tahun 2013 Dinas hanya dapat merealisasikan DAK untuk penggunaan belanja sarana jika output kegiatannya sudah tercapai (PMK 183/2013/Pasal 27 ayat 1). Untuk lebih jelas nya sisa anggaran / pagu DAK yang di gunakan dapat dilihat di point prosedur penyaluran dan pertanggungjawaban eks DAK.

Tabel 6
Analisis Realisasi Pendapatan dan Kinerja DAK Bidang Kesehatan
Pemerintah Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2010-2013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------|------------------|---|--|---------------------------|
| Tahun | Pagu/Anggaran | Realisasi | % Realisasi Pertumbuhan DAK $=((th - (th-1) / th-1) \times 100\%)$ | % Kinerja Pendapatan DAK $((2-3)/1 \times 100\%)$ | Wajar / Tidak Wajar |
| 2010 | Rp 4.404.800.000 | Rp 3.765.606.000 | | 85,49% | Tidak Wajar |
| 2011 | Rp 1.873.700.000 | Rp 1.801.885.918 | -52,00% | 96,17% | Wajar |
| 2012 | Rp 4.822.100.000 | Rp 4.583.895.386 | 154,39% | 95,06% | Wajar |
| 2013 | Rp 2.277.963.000 | Rp 1.932.268.324 | -57,85% | 84,82% | Tidak Wajar |

Sumber : Data sekunder (Diolah)

Realisasi pertumbuhan DAK, di tahun 2010 - 2011 mengalami pertumbuhan realisasi yang negatif sebesar 52,00%. Di tahun 2011 - 2012 mengalami pertumbuhan realisasi yang positif sebesar 154,39%, di tahun 2012 - 2013

² Wawancara dengan Ibu Lisa (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Pendidikan Salatiga

mengalami pertumbuhan realisasi yang kembali negatif sebesar 57,85%. Untuk kinerja DAK tahun 2010 sebesar 85,49 %, pada tahun 2011 terjadi selisih kurang sebesar 96,17 %, pada tahun 2012 terjadi selisih kurang 95,06%, dan di tahun 2013 selisih kurang menjadi 84,82%. Kinerja DAK bidang Kesehatan pada tahun 2010 selisih dianggap tidak wajar, pada tahun 2011 – 2012 selisih dianggap wajar karena lebih dari 90%, dan pada tahun 2011 kinerja DAK dianggap tidak wajar karena realisasinya dibawah 90%. Secara keseluruhan kinerja DAK Bidang Kesehatan dari total pendapatan pagu yang di terima telah direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Dinas Kesehatan, realisasi pertumbuhan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2010 – 2011 dan di tahun 2012 – 2013, karena di setiap tahunnya anggaran / perencanaan kegiatan DAK berbeda – beda, sehingga realisasinya pun berfluktuasi. Ditahun 2013 mengalami pertumbuhan yang negatif karena ada beberapa kegiatan di tahun 2013 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2015.³

Tabel 7
Analisis Realisasi Pendapatan DAK Bagian Infrastruktur Jalan
Pemerintah Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2010-2013

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|------------------|------------------|---|--|------------------------|
| Tahun | Pagu/Anggaran | Realisasi | % Realisasi Pertumbuhan DAK $=((th - (th-1) / th-1) \times 100\%)$ | % Kinerja Pendapatan DAK $((2-3)/1 \times 100\%)$ | Wajar / Tidak Wajar |
| 2010 | Rp 3.124.800.000 | Rp 3.060.798.181 | | 97,95% | Wajar |
| 2011 | Rp 5.639.900.000 | Rp 5.517.502.000 | 80,26% | 97,83% | Wajar |
| 2012 | Rp 6.538.600.000 | Rp 6.509.272.727 | 17,97% | 99,55% | Wajar |
| 2013 | Rp 2.774.947.500 | Rp 3.572.872.500 | -45,11% | 128,75% | Wajar |

Sumber : Data sekunder (Diolah)

³Wawancara dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan

Realisasi pertumbuhan DAK dari tahun 2010 - 2011 mengalami pertumbuhan positif sebesar 80,26%, pada tahun 2011 - 2012 mengalami pertumbuhan positif 17,97%, tetapi pada tahun 2012 - 2013 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 45,11%, hal ini disebabkan karena jumlah kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan pada tahun 2013 lebih banyak dibanding tahun 2012.

Kinerja Pendapatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan di tahun 2010 – 2012 mengalami selisih kurang, tetapi di tahun 2013 mengalami selisih lebih. Di tahun 2010 kinerja mengalami selisih kurang sebesar 97,95. Di tahun 2011 mengalami selisih kurang sebesar 97,83 %, di tahun 2012 mengalami selisih kurang lagi sebesar 99,55%, di tahun 2013 mengalami selisih lebih sebesar 128,75%. Kinerja DAK Bidang Infrastruktur Jalan tahun 2010 – 2011 selisih dikategorikan wajar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Bina Marga, DAK mengalami fluktuasi karena di setiap tahunnya anggaran kegiatan dapat bertambah atau berkurang. Dinas menyesuaikan setiap realisasi kegiatan dengan anggaran yang di berikan dari pusat, karena nilai kontrak juga sama dengan nilai anggaran / perencanaan kegiatan. Namun karena di tahun 2013 total DAK yang di terima oleh pemerintah daerah hanya 75% dari total anggaran DAK yang seharusnya, hal ini disebabkan karena DAK tahap ketiga tidak di *transfer* dari pusat, sehingga jumlah DAK yang diterima oleh Dinas Bina Marga lebih rendah dari biaya kegiatan yang dilaksanakan, hal ini dikarenakan ada kontrak proyek pembangunan jalan yang harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas sebelumnya.⁴

4.3 Prosedur Perencanaan / Penganggaran DAK Pada Pemerintahan Kota Salatiga

Untuk proses perencanaan DAK disesuaikan dalam siklus penyusunan / perencanaan APBD. Perencanaan DAK pada Pemerintahan Kota Salatiga diawali dari Dinas - Dinas mengajukan usulan anggaran untuk kegiatan - kegiatan yang

⁴Wawancara dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga.

akan dilakukan pada setahun kedepan kepada bagian administrasi DPPKAD. Dari kegiatan-kegiatan yang dianggarkan DPPKAD meninjau langsung ke lapangan dengan didasarkan pada Juknis (Petunjuk teknis), untuk memastikan usulan yang diajukan dari Dinas - Dinas sesuai dengan kondisi di Kota Salatiga. Kemudian setelah melakukan peninjauan, bagian administrasi DPPKAD memasukan usulan-usulan kegiatan tersebut kedalam RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) kepada Bappeda. Bappeda akan memproses RKA tersebut menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang nantinya akan diberikan lagi ke DPPKAD.

RKPD tersebut juga akan diberikan kepada pemerintah pusat, sebagai acuan penetapan alokasi DAK, RKPD telah ditetapkan dalam Perwali (Peraturan Walikota) pada setiap tahun anggaran yang nantinya akan diproses menjadi APBD. Dari APBD yang ada, SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) juga Ketua Sekretaris Daerah harus membuat DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), didalam dokumen pelaksanaan anggaran terdapat APBD dalam bentuk buku yang nantinya akan diterima oleh DPPKAD, dan point anggaran DAK dimasukkan kedalam DPA tersebut. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga ikut andil untuk menentukan Dana Pendamping sebesar 10% dari DAK yang dianggarkan pemerintah pusat. Berdasarkan DPA tersebut pemerintah pusat akan mengirim anggaran DAK ke RKUD (Rekening Kas Unit Daerah) yang nantinya akan diterima oleh DPPKAD, untuk nantinya di salurkan ke Dinas - Dinas sesuai dengan RKPD.⁵

Didalam Dinas sendiri perencanaan kegiatan dilakukan setiap akhir tahun paling lambat tanggal 31 Desember, setelah Juknis di tahun berikutnya keluar. Perencanaan kegiatan yang diajukan kepada DPPKAD dalam bentuk proposal, kegiatan yang direncanakan oleh Dinas akan disaring lagi sesuai dengan RKPD yang di buat oleh Bappeda. RKPD tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintah pusat. Di pemerintah pusat RKPD akan disesuaikan dengan kebutuhan nasional, setelah itu DAK baru di *transfer* ke RKUD.⁶

⁵Wawancara Dengan Bapak Adrik (Bagian Administrasi) di Kantor DPPKAD Salatiga

⁶Wawancara Dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

Pada Dinas Pendidikan perencanaan / penganggaran kegiatan dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut, tetapi untuk melakukan realisasi dari perencanaan kegiatan, Dinas mengalami beberapa kendala. Terutama karena adanya keterlambatan penerbitan Juknis DAK Bidang Pendidikan membuat Dinas sulit untuk dapat menganggarkan kegiatan untuk tahun berikutnya. Juknis pada tahun berikutnya di terima oleh Dinas seringkali pada bulan Februari - Maret, sedangkan di bulan September Dinas harus membuat proposal perencanaan kegiatan. Hal ini membuat Dinas harus melakukan anggaran perubahan untuk kegiatan di tahun selanjutnya.⁷

Untuk Dinas Bina Marga proposal anggaran kegiatan yang diberikan kepada pemerintah kota tidak memiliki kendala. Tetapi usulan kegiatan yang di berikan Dinas Bina Marga beberapa mengalami perubahan. Oleh karena anggaran kegiatan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah kota dan pemerintah pusat. Dinas Bina Marga harus menyesuaikan anggaran kegiatan yang tidak disetujui tersebut dengan realisasi. Anggaran yang diajukan tahun ini dapat di setujui pada tahun selanjutnya, hal tersebut sedikit menyulitkan karena setiap tahunnya harga bahan baku yang digunakan untuk proyek harganya dapat berubah.⁸

Di Dinas Kesehatan tidak seperti di kedua Dinas lainnya, anggaran kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Hanya saja untuk DAK yang dianggarkan tahun ini belum tentu dapat direalisasikan di tahun ini, realisasinya bisa terjadi di tahun berikutnya.⁹

4.4 Prosedur Pelaksanaan / Penggunaan DAK Pemerintah Kota Salatiga

Penggunaan DAK oleh ketiga Dinas yang menjadi objek penelitian, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga. Dinas Pendidikan menggunakan DAK khusus untuk Bidang Pendidikan, Dinas Kesehatan

Wawancara Dengan Ibu Lisa (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Pendidikan Salatiga
Wawancara Dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

⁷Wawancara Dengan Ibu Lisa (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Pendidikan Salatiga

⁸Wawancara Dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

⁹Wawancara Dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

menggunakan DAK khusus untuk Bidang Kesehatan, Dinas Bina Marga menggunakan DAK khusus untuk Bidang Infrastruktur Jalan, seperti yang dicantumkan dalam tabel 3, yang didasarkan pada Juknis yang berlaku.

4.4.1 Prosedur Pelaksanaan / Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Salatiga

Pada Dinas Pendidikan, DAK bidang Pendidikan SD, SMP, dan SMA digunakan untuk keperluan pendidikan dasar. Penggunaan yang dilakukan untuk sarana jaminan mutu dan prasarana sekolah. Prasarana yaitu pembangunan / perbaikan ruang kelas / gedung sekolah. Sarana jaminan mutu berbentuk penyediaan buku – buku paket pelajaran, dan alat – alat peraga untuk laboratorium sekolah. Pelaksanaan dan Penggunaan DAK didasarkan oleh Juklat (Perwali) dan Juknis yang berasal Kementerian Pendidikan Nasional. Juknis pada bidang pendidikan mengacu pada peraturan – peraturan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan tentang proses pelelangan, yaitu Peraturan Menteri yang terdapat di dalam Juknis dan Surat Keputusan Presiden (Kepres). Di tahun 2009 masih mengacu kepada Kepres no. 80, mulai di tahun 2012 keatas sudah mengacu kepada Kepres no. 54.

Untuk penyediaan sarana jaminan mutu Dinas melaksanakannya melalui proses pelelangan dengan mengacu kepada Kepres. Untuk pengadaan pembangunan / perbaikan sekolah atau ruang kelas dilakukan secara swakelola. Sekolah akan melakukan pembangunannya sendiri dengan membentuk tim pembangunan, yang disebut P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), yang anggotanya bisa dari anggota sekolah itu sendiri seperti guru – guru atau masyarakat sekitar. Untuk sekolah yang akan menerima DAK, Dinas mengikuti ketentuan dalam Juknis, didalam Juknis terdapat kriteria – kriteria sekolah yang layak menerima DAK. Dinas harus melakukan verifikasi dasar dengan melihat kondisi sekolah dan ketentuan – ketentuan yang ada dalam sekolah. Pembangunan / perbaikan sekolah atau ruang kelas juga dilihat dari verifikasi tersebut.

Kriteria lainnya yang terdapat dalam Juknis, setiap perbaikan gedung sekolah atau ruang kelas, meskipun sekolah sudah masuk dalam kriteria sekolah

harus sesuai dengan ketentuan, yaitu 35% kerusakan. Oleh karena itu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) diharuskan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari paket pembangunan yang akan dikerjakan. RAB tersebut nantinya diserahkan terlebih dahulu kepada Dinas Cipta Karya sebelum di tandatangani oleh Dinas Pendidikan. Perbaikan gedung sekolah dan ruang kelas baru dapat dilaksanakan setelah RAB tersebut di setujui oleh Dinas Cipta Karya dan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan.¹⁰

4.4.2 Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Pemeintah Kota Salatiga

DAK bidang Kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan digunakan untuk pembelian alat – alat kesehatan untuk Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Pustu (Puskesmas Pembantu), mobil ambulans, rehab atau perbaikan Puskesmas dan Pustu, dan penyediaan obat – obatan untuk Puskesmas dan Pustu, juga pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah (IPL). Dalam pelaksanaannya Dinas mengacu pada ketentuan – ketentuan yang ada di dalam Juknis. Di tahun 2009 – 2013 DAK tidak digunakan untuk pembangunan Puskesmas atau Pustu, karena sudah ada beberapa Puskesmas dan Pustu di Kota Salatiga. Dinas tinggal berfokus pada pemeliharaan seperti rehab pada Puskesmas dan Pustu.

Perbaikan Puskesmas dan Pustu setiap ketentuannya didasarkan dalam Juknis bidang Kesehatan yang dikeluarkan setiap tahunnya, baik dari segi pembangunan dan biaya minimal yang distandarkan. Di Kota Salatiga juga terdapat Instalasi Pengelolaan Limbah (IPL), sekarang ini sedang dibangun di Tingkir dan Siderejo kidul. Pembangunan itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yang akan melaksanakan pembangunan. Untuk pembangunan pemerintah kota langsung menyalurkan kepada pihak ketiga. Sedangkan untuk sarana langsung di salurkan kepada Dinas. Dinas yang akan membelanjakannya sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan teknis. Untuk DAK Bidang Kesehatan subbidang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Riri (Bagian Pelaksana DAK) di Kantor Dinas Pendidikan Salatiga

pelayanan rujukan, Dinas hanya berperan untuk memfasilitasi alat – alat kesehatan yang diperlukan.¹¹ Untuk subbidang kefarmasian pelaksanaan DAK yang dilakukan untuk penyediaan obat – obatan bagi Puskesmas dan Pustu. Penyediaan obat – obat tersebut adalah obat – obatan tingkat dasar 1. Subbidang farmasi menyesuaikan obat – obatan yang akan digunakan dengan Juknis yang berlakudan tingkat kebutuhan obat per kota, juga dengan jenis – jenis obat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Pusat dalam bentuk e-katalog (*electronic catalogue*), yang berisi obat – obatan yang bisa dipesan oleh bagian kefarmasian, kepada pabrik obat yang sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat. Setiap tahun jenis obat di dalam e-katalog bisa bertambah.¹²

4.4.3 Prosedur Penggunaan / Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan Pemerintah Kota Salatiga

DAK Bidang infrastruktur Jalan, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Jalan mengacu kepada Juknis dan Juklat, tetapi lebih banyak mengacu ke Juklak. DAK digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, penangan (perbaikan) jalan, dan pembangunan / perbaikan jembatan. DAK berperan dalam pembangunan jalan dan jembatan sebagai dana *share*, hanya berkisar 10% dari total pembangunan Jalan selebihnya menggunakan dana lain yang berasal dari Pemerintah Kota Salatiga.

Untuk kriteria perincian pembangunan dan menjamin bangunan dapat bertahan lama, dengan menggunakan bahan – bahan yang berkualitas dilakukan dengan mengacu pada kontrak proyek pembangunan yang berpatokan pada RAB yang sudah dibuat. Untuk Aspal yang digunakan dalam proyek pembangunan harus disesuaikan dengan RAB seperti Aspal Hedomade, dan ada Aspal Lapisan sebagai bahan dasar dalam proyek pembangunan jalan. Untuk penanganan jalan, tingkat kerusakan jalan tidak di ukur berdasarkan RCI (*Road Condition Index*), biasanya Dinas menggunakan patokan sendiri untuk menilai tingkat kerusakan

¹¹Wawancara dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

¹²Wawancara dengan Ibu Lina (Bagian Farmasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

jalan, ketika terjadi kerusakan pada jalan Dinas akan melaporkannya dan memasukkannya dalam anggaran kegiatan perbaikan jalan.¹³

4.5.1 Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban DAK

Alur penyaluran dan pertanggungjawaban DAK. Pertama terdapat pada pelaporan pihak ketiga yang menggunakan DAK untuk pembangunan dengan Dinas. Kedua, Pelaporan Dinas dengan DPPKAD. Ketiga, Pelaporan DPPKAD kepada pemerintah pusat atas pertanggungjawaban penyaluran DAK yang dilakukan dan Bappeda kepada pemerintah provinsi

Pelaporan pihak ketiga kepada Dinas, pada Dinas Pendidikan kepala sekolah melaporkan progress pembangunan sekolah dan perbaikan sekolah atau ruang kelas setiap akhir bulan. Pada Dinas Bina Marga, kontraktor memberikan laporan tiap bulannya dalam bentuk laporan presentase penyelesaian pembangunan atau penangan jalan yang terdapat dalam kontrak pembangunan. Pada Dinas Kesehatan, konsultan yang mengawasi pembangunan jalan, melaporkan setiap bulan kegiatan pembangunan yang dilakukan para pemborong.

Untuk Pelaporan DAK dari Dinas ke pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Bina Marga melakukan pelaporan triwulan DAK setiap 14 hari sebelum masa triwulan berakhir kepada DPPKAD / Bappeda.

Pada Dinas Bina Marga pelaporan yang dilakukan adalah melaporkan DAK yang sudah di kelola selama 3 bulan digunakan untuk apa saja, dan juga memasukan presentase penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan selama kurun waktu 3 bulan.¹⁴

Pada Dinas Pendidikan pelaporan harus dilakukan meskipun belum ada realisasi sekalipun yang dilakukan oleh Dinas, bahkan mungkin pelaporan triwulan tahap pertama tidak berbeda jauh dengan triwulan tahap kedua. Laporan triwulan yang ada berisikan penyerapan DAK yang juga dilakukan selama tiga bulan, untuk pembangunan dilihat dari laporan yang di berikan Kepala

¹³Wawancara dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

¹⁴Wawancara dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

Sekolah. Pengeluaran pembangunan tersebut akan dimasukkan dalam laporan triwulan.¹⁵ Pada Dinas Kesehatan laporan triwulan yang disampaikan juga sama seperti dengan Dinas yang lain, melaporkan penyerapan DAK selama tiga bulan.¹⁶ Untuk subbidang farmasi, DAK yang dilaporkan terdiri dari pemesanan obat – obatan dalam e-katalog, setiap perencanaan anggaran kegiatan, kemudian melaporkan stok barang yang masih ada 10 hari sebelum pelaporan pada Bagian Aset di Dinas Kesehatan. Dari bagian administrasi Dinas Kesehatan dan Bagian Farmasi Dinas Kesehatan akan memberikan laporannya ke bagian aset Dinas Kesehatan. Dari bagian aset di buat laporan triwulannya sebelum 14 hari masa triwulan berakhir.¹⁷ Semua laporan triwulan yang dibuat oleh ketiga Dinas tersebut nantinya akan di serahkan kepada Bappeda atau DPPKAD, kemudian dari DPPKAD dan Bappeda akan diproses dan dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Untuk penyaluran dan pertanggungjawaban DPPKAD ke pemerintah pusat dan Bappeda ke pemerintah provinsi, dilakukan dengan melaporkan data penyerapan DAK setiap 7 hari sebelum masa triwulan berakhir, DPPKAD akan mengirimkan data penyerapan tersebut kepada pusat dan Bappeda. Pada tahun 2013 pelaporan DAK sudah disediakan aplikasi sistem tersendiri. DPPKAD tinggal memasukan data penyerapan DAK pada triwulan tersebut. Namun pada tahun 2013 lalu DPPKAD ada ketentuan penyaluran DAK yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga, pada tahap kedua jumlah DAK yang direalisasikan kurang dari 90% dana tahap kedua yang sudah di *transfer*, sehingga untuk pencairan DAK tahap ketiga tidak di *transfer* dari pusat.¹⁸ Setiap tahap penerimaan DAK harus direalisasikan 90% dari total anggaran yang di *transfer* (PMK No. 201/ PMK 07/2012)

¹⁵Wawancara dengan Bapak Riri (Bagian Pelaksana DAK) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

¹⁶Wawancara dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

¹⁷Wawancara dengan Ibu Lina (Bagian Farmasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

¹⁸Wawancara dengan Bapak Adrik (Bagian Administrasi) di Kantor DPPKAD Salatiga

4.5.2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Sisa Anggaran DAK (Eks DAK)

Dalam kaitannya dengan proses pelaporan DAK, DPPKAD juga bertanggungjawab dengan pelaporan sisa anggaran DAK. Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk sisa anggaran DAK (Eks DAK) yang tidak terpakai / tidak bisa direalisasikan pada tahun anggaran, dan baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran selanjutnya, sesuai dengan PMK no 183 tahun 2013 pasal 27 ayat 4, dari pemerintah pusat menentukan untuk penyaluran DAK tahap pertama di perlukan lampiran laporan penggunaan sisa DAK tahun 2010 – 2012. Penggunaan eks DAK diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Keuangan selama eks DAK tersebut terjadi karena terdapat kendala dalam melakukan realisasi dengan perencanaan kegiatan yang telah disusun, bukan karena perencanaan kegiatan tidak di kerjakan selama akhir tahun anggaran. Berikut data penggunaan Eks DAK di tahun anggaran 2010 – 2012 berdasarkan Laporan Penggunaan Sisa DAK tahun anggaran 2010 - 2012.¹⁹

Tabel 8
Data Penggunaan Eks DAK Tahun Anggaran 2010 – 2012

| Tahun Anggaran | Tahun Realisasi | Bidang DAK | Jumlah |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 2010 | 2013 | Pendidikan | Rp 528.089.000 |
| 2011 | 2012 | Pendidikan | Rp 665.710.000 |
| 2012 | 2013 | Pertanian | Rp 142.061.000 |

Sumber : Data Sekunder (Laporan Penggunaan Sisa DAK Tahun 2010 – 2012)

Di Kota Salatiga sampai dengan tahun 2013 ada beberapa eks DAK yang telah di realisasikan. Eks DAK bidang Pendidikan di tahun anggaran 2010di realisasikan tahun 2013 sebesar Rp. 528.089.000. Eks DAK tahun anggaran 2011 bidang Pendidikan di realisasikan tahun 2012 sebesar Rp. 665.710.000. Untuk tahun anggaran 2012 eks DAK yang di realisasikan adalah eks DAK Bidang Pertanian sebesar Rp. 142.061.000. Eks DAK yang telah direalisasikan, berasal daei DAK

¹⁹Wawancara dengan Bapak Adrik (Bagian Administrasi) di Kantor DPPKAD Salatiga

pada tahun 2010 dan 2011 pada tabel 5 Bidang Pendidikan yang belum direalisasikan.

4.6 Prosedur Evaluasi dan Pengawasan DAK

Evaluasi dan Pengawasan DAK dalam penelitian ini peneliti membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, Evaluasi dan pengawasan Dinas terkait DAK yang diberikan kepada pihak ketiga. Kedua, Evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat terhadap Dinas – Dinas yang menerima DAK. Ketiga, Evaluasi dan pengawasan pada DPPKAD oleh Bappeda yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Evaluasi dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas atas pihak ketiga yang menerima DAK. Pada Dinas Pendidikan melakukan pengawasan pada jalannya pembangunan / perbaikan sekolah dan ruang kelas dengan melalui survei langsung, dan menanyakan kendala yang dihadapi oleh P2S (Panitia Pembangunan Sekolah), dan memberikan saran atau teguran agar proyek pembangunan DAK dapat diselesaikan sebelum akhir tahun.

Pada Dinas Bina Marga melalui kontrak proyek pembangunan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah dibuat. Dalam kontrak proyek pembangunan terdapat *timeschedule*, dalam satu tahun anggaran pembangunan ditargetkan sudah selesai. Target penyelesaiannya di setiap bulan juga ada di dalam kontrak proyek pembangunan. Dinas Bina Marga melakukan pengawasan atas pemanfaatan DAK melalui kontrak tersebut.

Pada Dinas Kesehatan ada pihak yang mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Pemborong / Kontraktor) yaitu konsultan yang bertugas mengecek jalannya pembangunan, konsultan itu nantinya juga akan diperiksa oleh Lembaga Lingkungan Hidup (LH), hasil dari pemeriksaan yang ada akan diberikan kepada Dinas Cipta Karya, untuk pengawasan pada pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah dilakukan oleh Penyehatan Lingkungan (PL).²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Riri (Bagian Pelaksana DAK) di Kantor Dinas Pendidikan Salatiga

Wawancara dengan Bapak Mul (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Kesehatan Salatiga

Evaluasi dan pengawasan atas Dinas yang menerima DAK, pada Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dilakukan oleh Bappeda dan pemerintah provinsi. Biasanya evaluasi yang dilakukan bukan hanya terkait DAK, tetapi semua aspek yang ada di Dinas.

Evaluasi pada DPPKAD dilakukan setiap tahun oleh Menteri keuangan dan pemerintah provinsi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi APBD secara menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan biasanya dari Bappeda baru ke DPPKAD.²¹

Tabel 9
Evaluasi dan Analisis Gambaran Pengelolaan DAK

| No | Dinas Pengelola DAK | Temuan | Pengelolaan |
|----|---------------------|---|-------------|
| 1. | Dinas Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan DAK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.(Permendikbud No.8 tahun 2013 dan Permendikbud No.12 tahun 2013). Terkait dengan penggunaan, penyaluran / pelaporan, dan pengawasan / evaluasi DAK. 2. Perencanaan kegiatan harus disesuaikan lagi dengan Juknis tahun selanjutnya, karena Juknis pada tahun selanjutnya sering mengalami keterlambatan. 3. Pada tahun 2010-2013 realisasi DAK di tahap kedua tidak sampai 90% dari total anggaran yang ditransfer | Buruk |
| 2 | Dinas Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan DAK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.(Permenkes No.55 | Baik |

Wawancara dengan Bapak Hari (Bagian Administrasi) di Kantor Dinas Bina Marga Salatiga

²¹Wawancara dengan Bapak Adrik (Bagian Administrasi) di Kantor DPPKAD Salatiga

| | | | |
|---|------------------|--|-------|
| | | <p>Tahun 2012). Terkait dengan penggunaan, penyaluran / pelaporan, dan pengawasan / evaluasi DAK.</p> <p>2. Perencanaan kegiatan tidak mengalami hambatan, termasuk pada Juknis dan ketentuan prioritas nasional.</p> <p>3. Pada tahun 2013, realisasi DAK di tahap kedua tidak sampai 90% dari total anggaran yang ditransfer.</p> | |
| 3 | Dinas Bina Marga | <p>1. Pengelolaan DAK sudah sesuai dengan aturan yang berlaku (PermenPU No.15 / M / PRT / 2010). Terkait dengan penggunaan, penyaluran / pelaporan, dan pengawasan / evaluasi DAK.</p> <p>2. Perencanaan kegiatan yang diusulkan dengan yang disetujui Bappeda dan Pemerintah Pusat seringkali berbeda.</p> <p>3. Pada tahun 2013 realisasi DAK pada tahap kedua tidak mencapai 90% dari total anggaran DAK.</p> | Buruk |

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis data Laporan Realisasi DAK tahun anggaran 2010 – 2013 dan hasil evaluasi pengelolaan DAK pada setiap prosedur pengelolaan, yaitu prosedur perencanaan / penganggaran, prosedur penggunaan / pelaksanaan, prosedur pelaporan / pertanggungjawaban, prosedur pengawasan / evaluasi. Secara keseluruhan, pengelolaan DAK telah dilakukan sesuai dengan peraturan – peraturan terkait DAK.

Dari ketiga Bidang DAK yang di teliti dalam penelitian ini terlihat bahwa Bidang Kesehatan yang memiliki pengelolaan lebih baik, baik itu dari sisi penganggaran / perencanaan, penggunaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dan juga evaluasinya. Sedangkan pada Bidang Pendidikan pengelolaannya harus ditingkatkan lagi, hal ini terkait dengan kendala – kendala terbesar dalam optimalisasi pengelolaan DAK, yaitu kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan Dinas, karena Juknis Bidang Pendidikan seringkali terlambat disalurkan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga, sedangkan Dinas sudah harus menganggarkan kegiatannya di bulan September. Selanjutnya pada Bidang Infrastruktur Jalan, untuk anggaran kegiatan pembangunan yang dianggarkan / direncanakan tidak semua dari usul kegiatan tersebut yang terpenuhi dan ditunda untuk dianggarkan di tahun selanjutnya. Kegiatan yang ditunda anggarannya untuk tahun selanjutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan akan ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

Selain permasalahan di setiap bidang DAK, kendala juga terdapat pada kinerja pengelolaan DAK yang di lakukan pada ketiga Bidang tersebut kurang optimal. Berdasarkan hasil analisis data laporan realisasi DAK, DAK pada ketiga Bidang tersebut cenderung menurun realisasinya pada *transfer* DAK tahap yang kedua. Untuk mengoptimalkan kinerja DAK perlu adanya koordinasi yang baik antara Dinas dengan pemerintah pusat untuk menghindari Juknis yang terlambat. Perlu juga adanya persyaratan di dalam Juknis terkait perencanaan DAK agar perencanaan DAK bisa berjalan sesuai standar yang ada. Setiap Dinas yang menerima DAK terutama ketiga Dinas yang menjadi objek penelitian untuk meningkatkan realisasi kegiatan – kegiatan di setiap tahap, rencana kegiatan juga dapat ditentukan berdasarkan pertahap DAK.

Keterbatasan

Pada penelitian ini peneliti tidak memiliki akses kepada data dari pihak ketiga (contohnya: Kontraktor / Pemborong dan P2S) mengenai besaran nilai proyek dan melakukan wawancara dengan pihak ketiga.

Saran

Pemerintah pusat dapat mengkoordinasikan DAK dengan Dinas – Dinas terkait agar tidak terjadi keterlambatan Juknis lagi. Pemerintah pusat juga dapat menambahkan peraturan terkait perencanaan / penganggaran DAK secara lebih rinci terutama pada DAK Bidang Infrastruktur Jalan agar perencanaan dapat sesuai dengan prioritas nasional dan kondisi di setiap daerah

Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini Bappeda / DPPKAD perlu menekankan optimalisasi dari kegiatan DAK, dan memberikan target kepada setiap Dinas agar dapat merealisasikan kegiatannya sesuai dengan yang dianggarkan.

Untuk setiap Dinas yang diteliti disini dapat melakukan perencanaan kegiatan yang setiap tahapnya sudah ditentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, agar penggunaan DAK di tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 kinerjanya dapat mencapai 90 % dari total *transfer* DAK per triwulannya. Dinas juga perlu memperhatikan *time manajemen* yang tepat, Juknis DAK yang terlambat dapat diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat jauh hari sebelum bulan Agustus.

Untuk penelitian yang akan datang peneliti menyarankan untuk menambahkan lagi di antara 9 Bidang DAK lainnya yang belum menjadi objek penelitian, serta mencari akses kepada data pihak ketiga (contoh: kontraktor, pemborong, dll) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Salatiga Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.
- Gribaldi.2008. Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Penyusunan APBD.*Jurnal Universitas Baturaja Vol. 1 No. 2*.
- HaditzLila,dkk.2008. Mekanisme Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus. *Lembaga Penelitian SMERU*
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. LPP STIM YKPN.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK 07/2012 *tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2013*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 tahun 2013/PMK 07/2013 *tentang Pedoman Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 tahun 2013/ PMK 07 / 2013 *tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran transfer ke daerah*
- Permendagri nomor 59 tahun 2012 *tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri no.73 tahun 2011 tentang Petunjuk teknis pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian dalam negeri tahun 2012*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2013 *tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan tahun anggaran 2014*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 *tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun anggaran 2013*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 15/PRT/M tahun 2010 *tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang Pekerjaan Umum tahun anggaran 2010*.
- PP No.55 Tahun 2005 *mengaturtentang Dana Perimbangan*
- Setiawan B. 2014. Evaluasi Pengukuran Kinerja yang Tepat untuk Mendukung Key Succes Factor dalam Rencana Pengembangan Usaha Sekolah Ballet Flamboyant di Surabaya. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 3 No.1 (2014)*

Surat Keputusan Presiden No.54 tahun 2012 *tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012*

Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Republik Indonesia. 2013. *Pengelolaan DAK dan Strategi kedepan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*

Winarta. I. M. 2006. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.

Undang - Undang No.17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang - Undang No.33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Personal

Name : Merry Angeline Endoh
Address : Jl.Monginsidi 1 no. 10 , Salatiga, Jawa Tengah
Place, Date of Birth : San Bernardino, 13 Januari 1990
Sex : Female
Religion : Christian
Phone : 085289317998
Email : merryangeline@gmail.com

Educational Background

2010 Satya Wacana Christian University, Salatiga
Majoring: Accounting
2006 Santa Rosa de Lima Chatolic Senior High School, Tondano

Organization Experience:

2012 Coordinator of Refreshment Team 'The Easter Commitee"
2012 Team of "Campus Ministry 2010-2011"
2010 Member of Community Service "Dies Natalis SWCU 2010"

Other Experience:

2010 Participant of " English Competition Class"
2011 Participant of " Leadership Outbound Training"
2014 Participant of "National Seminar on Accounting"

LAMPIRAN



| Prosedur Wawancara (Berdasarkan Juknis) | | |
|--|---|---|
| Pertanyaan Untuk Dinas Pendidikan | Pertanyaan Untuk Dinas Kesehatan | Pertanyaan Untuk Dinas Bina Marga |
| <p>1. Menurut bapak/ibu sejauh ini bagaimana pengelolaan DAK yang dilakukan di Dinas Pendidikan ini?</p> <p>2. Apakah ada peraturan lain yang menjadi dasar dinas dalam pengelolaan DAK selain juknis?</p> <p>3. Apakah Dinas mengajukan usul kegiatan pada setiap tahun di DPPKAD?, Bagaimana pengajuan usul kegiatan yang dilakukan?</p> <p>4. Apakah bendahara/bagian anggaran didalam dinas yang menerima DAK dan apakah bagian tersebut juga yang mengelola DAK sesuai dengan rencana kegiatan?</p> <p>5. Apakah jumlah rehabilitasi gedung/ruangan yang rusak pada sekolah-sekolah, pembelian peralatan untuk sarana Laboratorium sekolah berpatokan pada jumlah alokasi biaya yang dicantumkan dalam juknis?</p> <p>6. Selain untuk kegiatan dasar, apakah DAK juga digunakan untuk kegiatan lain seperti yang tercantum dalam juknis?</p> <p>7. Bagaimana bapak/ibu mengawasi kegiatan DAK yang dilakukan sudah berjalan baik? apakah dalam setiap kegiatan yang dilakukan terdapat kepala pelaksana yang bertanggungjawab?</p> <p>8. Apakah untuk pembangunan rehabilitasi gedung dan ruang kelas menggunakan mekanisme swakelola?</p> <p>9. Apakah dinas mengadministrasi dan mendokumentasikan segala kegiatan pembangunan baik</p> | <p>1. Menurut bapak/ibu sejauh ini bagaimana pengelolaan DAK yang dilakukan di Dinas Pendidikan ini?</p> <p>2. Apakah ada peraturan lain yang menjadi dasar dinas dalam pengelolaan DAK selain juknis?</p> <p>3. Apakah Dinas mengajukan usul kegiatan pada setiap tahun di DPPKAD? Bagaimana Dinas mengajukan usul kegiatan pada setiap tahun di DPPKAD?</p> <p>4. Apakah bendahara/bagian anggaran didalam dinas yang menerima DAK dan apakah bagian tersebut juga yang mengelola DAK sesuai dengan rencana kegiatan?</p> <p>5. DAK yang diterima dinas kesehatan sejauh ini digunakan untuk kegiatan apa saja?</p> <p>6. Bagaimana peran dinas kesehatan dalam pembangunan pustu?</p> <p>7. Apakah dalam pembangunan pustu disesuaikan dengan persyaratan umum sampai dengan persyaratan teknis, baik dalam penentuan lokasi sampai dengan luas bangunan?</p> <p>8. Apakah di Kota Salatiga terdapat instalasi pengelolaan limbah?, bagaimana dinas berperan didalam pengelolaannya?</p> <p>9. Untuk DAK bidang kesehatan subbidang pelayanan rujukan, setiap fasilitas yang ada pada tempat tidur kelas tiga rumah sakit, apakah setiap tahunnya dianggarkan?</p> <p>10. Apakah dalam pengelolaan DAK yang diberikan juga ditujukan untuk kegiatan ponek?</p> | <p>1. Menurut bapak / ibu sejauh ini bagaimana pengelolaan DAK yang dilakukan di Dinas Pendidikan ini?</p> <p>2. Apakah ada peraturan lain yang menjadi dasar dinas dalam pengelolaan DAK selain juknis?</p> <p>3. Apakah Dinas mengajukan usul kegiatan pada setiap tahun di DPPKAD? Bagaimana Dinas mengajukan usul kegiatan pada setiap tahun di DPPKAD ?</p> <p>4. Apakah bendahara/bagian anggaran didalam dinas yang menerima DAK dan apakah bagian tersebut juga yang mengelola DAK sesuai dengan rencana kegiatan?</p> <p>5. Bagaimana Langkah-langkah Penanganan Jalan yang dilakukan Kota Salatiga?</p> <p>6. Untuk Pembangunan jalan sendiri jumlah DAK bidang infrastruktur jalan, dapat membantu berapa persen dari total konstruksi jalan?</p> <p>7. Bagaimana dinas memastikan kegiatan yang dilakukan telah berjalan dengan baik?, apakah terdapat monitoring/pengawasan?, dan apakah ada bagian yang diberikan tanggungjawab untuk setiap kegiatan yang dilakukan?</p> <p>8. Apakah dalam program penanganan jalan berdasarkan perhitungan RCI (Road Condition Indeks) Provinsi?</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>administrasi maupun teknis?</p> <p>10. Apakah panitia pembangunan teknis memberikan laporan teknis penggunaan realisasi dana dan pelaksanaan rehabilitasi?</p> <p>11. Bagaimana pelaporan realisasi DAK dilakukan? Apakah pelaporan triwulan Dinas Pendidikan dilakukan selalu setiap 14 hari setelah triwulan berakhir?</p> <p>12. Bagaimana Evaluasi/Pemantauan DAK bidang kesehatan dilakukan?</p> <p>13. Adakah dari pertanyaan tsb yang bapak/ibu ingin tambahkan terkait pengelolaan DAK?</p> | <p>11. Bagaimana penyaluran yang dilakukan untuk pembangunan ICU dan IGD?</p> <p>12. Apakah pembangunan dan perlengkapan peralatan yang memadai yang digunakan dalam kegiatan bank darah (pengambilan darah) sudah disesuaikan dengan juknis?</p> <p>13. Apakah obat-obatan dalam subbidang kefarmasian, penyediaan obat baru dan jenis obat disesuaikan dengan juknis?</p> <p>14. Apakah pernah ada permohonan realokasi DAK subbidang pelayanan kefarmasian yang dilakukan Dinas Kesehatan Salatiga?</p> <p>15. Bagaimana Pelaporan kegiatan DAK yang disalurkan keberbagai subbidang dilaporkan?</p> <p>16. Apakah dinas bertanggungjawab dalam mengawasi setiap kegiatan yang berlangsung?</p> <p>17. Apakah pelaporan triwulan Dinas Kesehatan dilakukan selalu setiap 14 hari setelah triwulan berakhir?</p> <p>18. Bagaimana pelaporan akhir tahun Dinas Kesehatan dilakukan?</p> <p>19. Bagaimana Evaluasi/Pemantauan DAK bidang kesehatan dilakukan?</p> <p>20. Adakah dari pertanyaan tersebut yang ingin bapak/ibu tambahkan terkait pengelolaan DAK?</p> | <p>9. Apakah untuk pembangunan jalan dinas juga berpatokan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya)?</p> <p>10. Bagaimana metode pelaksanaan konstruksi jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga?</p> <p>11. Bagaimana pelaporan DAK yang disalurkan untuk setiap kegiatan?</p> <p>12. Bagaimana pelaporan DAK bidang infrastruktur jalan yang dilakukan Dinas Bina Marga?</p> <p>13. Bagaimana Evaluasi/Pemantauan yang dilakukan Dinas Bina Marga?</p> <p>14. Adakah dari pertanyaan tersebut yang bapak/ibu ingin tambahkan terkait pengelolaan DAK?</p> |
|--|--|--|



WALIKOTA SALATIGA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA LOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara :

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| Tahap I | : | Rp. 6.354.690.000,- |
| Tahap II | : | Rp. 9.532.035.000,- |
| Tahap III | : | Rp. 5.295.575.000,- |
| Total | : | Rp. 21.182.300.000,- |

| NO | BIDANG | PAGU | REALISASI PEMBAYARAN DARI RKUD (melalui SP2D Daerah) | SISA DAK DI KAS DAERAH | RELISASI PELAKS FISIK KEGIATAN sd 31 DES. 2010 |
|----|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendidikan | 8.385.100.000 | 2.341.823.459 | 6.043.276.541 | 97,99% |
| 2 | Pel. Kes. Dasar | 2.458.300.000 | 1.819.106.000 | 639.194.000 | 100% |
| 3 | Pel. Kes Rujukan | 1.946.500.000 | 1.946.500.000 | 0 | 100% |
| 4 | Jalan | 3.124.800.000 | 3.060.798.181 | 64.001.819 | 100% |
| 5 | Irigasi | 441.000.000 | 420.950.909 | 20.049.091 | 100% |
| 6 | Air Minum | 589.400.000 | 542.044.000 | 47.356.000 | 82,13% |
| 7 | Sanitasi | 789.500.000 | 789.500.000 | 0 | 100% |
| 8 | Kelautan dan Perikanan. | 1.056.300.000 | 896.941.800 | 159.358.200 | 85% |
| 9 | Lingkungan Hidup | 687.800.000 | 662.134.373 | 25.665.627 | 100% |
| 10 | Keluarga Berencana | 601.000.000 | 601.000.000 | 0 | 100% |
| 11 | Kehutanan | 1.102.600.000 | 976.516.000 | 126.084.000 | 91,67% |
| | | | | | |
| | JUMLAH | 21.182.300.000 | 14.057.314.722 | 7.124.985.278 | |



WALIKOTA SALATIGA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 TAHAP III

Yang bertanda tangan dibawah ini Walikota Salatiga menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 Tahap III sebagai berikut :

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

| | |
|-----------|------------------|
| Tahap I | : 7,062,180,000 |
| Tahap II | : 10,593,270,000 |
| Tahap III | : 5,885,150,000 |
| Total | : 23,540,600,000 |

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tahap ini | : 4,287,163,766 |
| Kumulatif s.d Tahap ini | : 14,693,869,291 |

| | |
|---|-----------------|
| Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah | : 8,846,730,709 |
| Persentase Sisa Dana DAK | : 37.58% |

| NO | BIDANG | PAGU | REALISASI PEMBAYARAN DARI RKUD MELALUI SP2D DAERAH | | | SISA PAGU |
|--------|-----------------------------|----------------|---|---------------|----------------------------|---------------|
| | | | TAHAP SEBELUM | TAHAP INI | KOMULATIF s.d.TAHAP INI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendidikan SD | 6,880,500,000 | - | 697,331,700 | 697,331,700 | 6,183,168,300 |
| 2 | Pendidikan SMP | 1,678,700,000 | - | 303,327,900 | 303,327,900 | 1,375,372,100 |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 1,159,000,000 | 820,427,000 | 282,000,000 | 1,102,427,000 | 56,573,000 |
| 4 | Kesehatan Pelayanan Farmasi | 714,700,000 | 699,458,918 | - | 699,458,918 | 15,241,082 |
| 5 | Infrastruktur Jalan | 5,639,900,000 | 5,517,502,000 | - | 5,517,502,000 | 122,398,000 |
| 6 | Infrastruktur Irigasi | 1,185,600,000 | 833,152,728 | 152,524,545 | 985,677,273 | 199,922,727 |
| 7 | Infrastruktur Air Minum | 738,200,000 | 449,375,000 | 285,189,000 | 734,564,000 | 3,636,000 |
| 8 | Infrastruktur Sanitasi | 790,600,000 | 192,333,000 | 393,850,000 | 586,183,000 | 204,417,000 |
| 9 | Kelautan dan Perikanan | 1,708,000,000 | 642,361,879 | 796,643,621 | 1,439,005,500 | 268,994,500 |
| 10 | Lingkungan Hidup | 741,700,000 | 133,200,000 | 367,658,500 | 500,858,500 | 240,841,500 |
| 11 | Keluarga Berencana | 711,600,000 | 314,275,000 | 322,659,000 | 636,934,000 | 74,666,000 |
| 12 | Kehutanan | 1,048,800,000 | 270,474,000 | 685,979,500 | 956,453,500 | 92,346,500 |
| 13 | Keselamatan Transp. Darat | 543,300,000 | 534,146,000 | - | 534,146,000 | 9,154,000 |
| Jumlah | | 23,540,600,000 | 10,406,705,525 | 4,287,163,766 | 14,693,869,291 | 8,846,730,709 |

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.



WALIKOTA SALATIGA
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Walikota Salatiga menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Penerimaan dari Kas Umum Negara | Rp8.291.928.000 |
| Tahap I | Rp12.437.892.000 |
| Tahap II | Rp6.909.940.000 |
| Tahap III | Rp27.639.760.000 |
| Total | |

| | |
|--|------------------|
| Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah | Rp2.670.024.059 |
| Tahap Ini | Rp18.210.269.664 |
| Kumulatif s.d Tahap Ini | Rp9.429.490.336 |
| Sisa Dana DAK di Rekening Kas Umum Daerah | 34,11 |
| Persentase Sisa Dana DAK | |

| No | Bidang | Pagu | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) | | | Sisa Pagu |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Tahap sebelumnya | Tahap Ini | Kumulatif s.d Tahap Ini | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4+5) | 7 = (3 - 6) |
| 1 | Pendidikan SD | 4.254.130.000 | 0 | 0 | 0 | 4.254.130.000 |
| 2 | Pendidikan SMP | 1.704.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.704.450.000 |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 1.677.890.000 | 488.021.000 | 967.250.000 | 1.455.271.000 | 222.619.000 |
| 4 | Kesehatan Farmasi | 571.230.000 | 568.924.386 | 0 | 568.924.386 | 2.305.614 |
| 5 | Kesehatan Pelayanan Rujukan | 2.572.980.000 | 2.559.700.000 | 0 | 2.559.700.000 | 13.280.000 |
| 6 | Infrastruktur Jalan | 6.538.600.000 | 6.509.272.727 | 0 | 6.509.272.727 | 29.327.273 |
| 7 | Infrastruktur Irigasi | 1.336.310.000 | 1.197.815.205 | 0 | 1.197.815.205 | 138.494.795 |
| 8 | Infrastruktur Air Minum | 854.600.000 | 572.912.337 | 87.195.000 | 660.107.337 | 194.532.663 |
| 9 | Infrastruktur Sanitasi | 1.013.330.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 13.330.000 |
| 10 | Kelautan dan Perikanan | 1.067.020.000 | 298.984.000 | 684.947.000 | 983.931.000 | 83.089.000 |
| 11 | Pertanian | 2.784.640.000 | 0 | 79.120.000 | 79.120.000 | 2.705.520.000 |
| 12 | Lingkungan Hidup | 744.780.000 | 696.420.000 | 24.022.000 | 720.442.000 | 24.338.000 |
| 13 | Keluarga Berencana | 626.190.000 | 626.190.000 | 0 | 626.190.000 | 0 |
| 14 | Kehutanan | 1.210.210.000 | 845.478.950 | 327.490.059 | 1.172.969.009 | 37.240.991 |
| 15 | Keselamatan Transportasi Darat | 683.360.000 | 676.527.000 | 0 | 676.527.000 | 6.833.000 |
| Jumlah | | 27.639.760.000 | 15.540.245.605 | 2.670.024.059 | 18.210.269.664 | 9.429.490.336 |

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.



WALIKOTA SALATIGA

Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

| | | |
|--------------|--------------|-----------------------|
| Tahap I | : Rp. | 5,626,158,000 |
| Tahap II | : Rp. | 8,439,237,000 |
| Tahap III | : Rp. | |
| Total | : Rp. | 14,065,395,000 |

| No | Bidang | Pagu | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (Melalui SP2D Daerah) | Sisa DAK di Kas Daerah | Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan 31 Desember |
|----|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 1,406,617,500 | | 1,406,617,500 | |
| 2 | Kesehatan Pelayanan Farmasi | 762,480,000 | 918,268,524 | (155,788,524) | |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Rujukan | 795,097,500 | 1,013,999,800 | (218,902,300) | |
| 4 | Infrastruktur Jalan | 2,774,947,500 | 3,572,872,500 | (797,925,000) | |
| 5 | Infrastruktur Irigasi | 1,528,785,000 | 1,839,703,256 | (310,918,256) | |
| 6 | Infrastruktur Air Minum | 659,910,000 | 651,745,000 | 8,165,000 | |
| 7 | Infrastruktur Sanitasi | 574,320,000 | 395,016,181 | 179,303,819 | |
| 8 | Kelautan dan Perikanan | 1,038,615,000 | 1,316,862,000 | (278,247,000) | |
| 9 | Pertanian | 2,186,317,500 | 715,225,000 | 1,471,092,500 | |
| 10 | Lingkungan Hidup | 692,910,000 | 362,172,000 | 330,738,000 | |
| 11 | Keluarga Berencana | 489,435,000 | 652,100,000 | (162,665,000) | |
| 12 | Kehutanan | 805,650,000 | 784,213,450 | 21,436,550 | |
| 13 | Keselamatan Transportasi Darat | 350,310,000 | 452,506,000 | (102,196,000) | |
| | JUMLAH | 14,065,395,000 | 12,674,683,711 | 1,390,711,289 | |



WALIKOTA SALATIGA

Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

| | | |
|--------------|--------------|----------------------|
| Tahap I | : Rp. | 2,893,365,000 |
| Tahap II | : Rp. | |
| Tahap III | : Rp. | |
| Total | : Rp. | 2,893,365,000 |

| No | Bidang | Pagu | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (Melalui SP2D Daerah) | Sisa DAK di Kas Daerah | Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan 31 Desember |
|----|----------------|----------------------|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pendidikan SD | 605,445,000 | 92,108,000 | 513,337,000 | |
| 2 | Pendidikan SMP | 634,158,000 | - | 634,158,000 | |
| 3 | Pendidikan SMA | 473,799,000 | - | 473,799,000 | |
| 4 | Pendidikan SMK | 1,179,963,000 | - | 1,179,963,000 | |
| | JUMLAH | 2,893,365,000 | 92,108,000 | 2,801,257,000 | |

Salatiga, Maret 2014

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO, SE, MM

**WALIKOTA SALATIGA****LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010**

| No | Bidang | Sisa DAK Tahun 2010 | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum (Melalui SP2D Daerah) | Sisa di Kasda |
|----|-----------------------------|---------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 - 4) |
| 1 | Pendidikan | 6.043.276.541 | 528.089.000 | 5.515.187.541 |
| 2 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 639.194.000 | 0 | 639.194.000 |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Rujukan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Infrastruktur Jalan | 64.001.819 | 0 | 64.001.819 |
| 5 | Infrastruktur Irigasi | 20.049.091 | 0 | 20.049.091 |
| 6 | Infrastruktur Air Minum | 47.358.000 | 0 | 47.358.000 |
| 7 | Infrastruktur Sanitasi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kelautan dan Perikanan | 159.358.200 | 0 | 159.358.200 |
| 9 | Lingkungan Hidup | 25.665.627 | 0 | 25.665.627 |
| 10 | Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kehutanan | 126.084.000 | 0 | 126.084.000 |
| | Jumlah | 7.124.985.278 | 528.089.000 | 6.596.896.278 |

**WALIKOTA SALATIGA****LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011**

| No | Bidang | Sisa DAK Tahun 2011 | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum (Melalui SP2D Daerah) | Sisa di Kasda |
|----|--------------------------------|---------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 - 4) |
| 1 | Pendidikan SD | 6.183.168.300 | 436.930.000 | 5.746.238.300 |
| 2 | Pendidikan SMP | 1.375.372.100 | 228.780.000 | 1.146.592.100 |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 56.573.000 | 0 | 56.573.000 |
| 4 | Kesehatan Pelayanan Farmasi | 15.241.082 | 0 | 15.241.082 |
| 5 | Infrastruktur Jalan | 122.396.000 | 0 | 122.396.000 |
| 6 | Infrastruktur Irigasi | 199.922.727 | 0 | 199.922.727 |
| 7 | Infrastruktur Air Minum | 3.636.000 | 0 | 3.636.000 |
| 8 | Infrastruktur Sanitasi | 204.417.000 | 0 | 204.417.000 |
| 9 | Kelautan dan Perikanan | 268.994.500 | 0 | 268.994.500 |
| 10 | Lingkungan Hidup | 240.841.500 | 0 | 240.841.500 |
| 11 | Keluarga Berencana | 74.666.000 | 0 | 74.666.000 |
| 12 | Kehutanan | 92.346.500 | 0 | 92.346.500 |
| 13 | Keselamatan Transportasi Darat | 9.154.000 | 0 | 9.154.000 |
| | Jumlah | 8.846.730.709 | 665.710.000 | 8.181.020.709 |

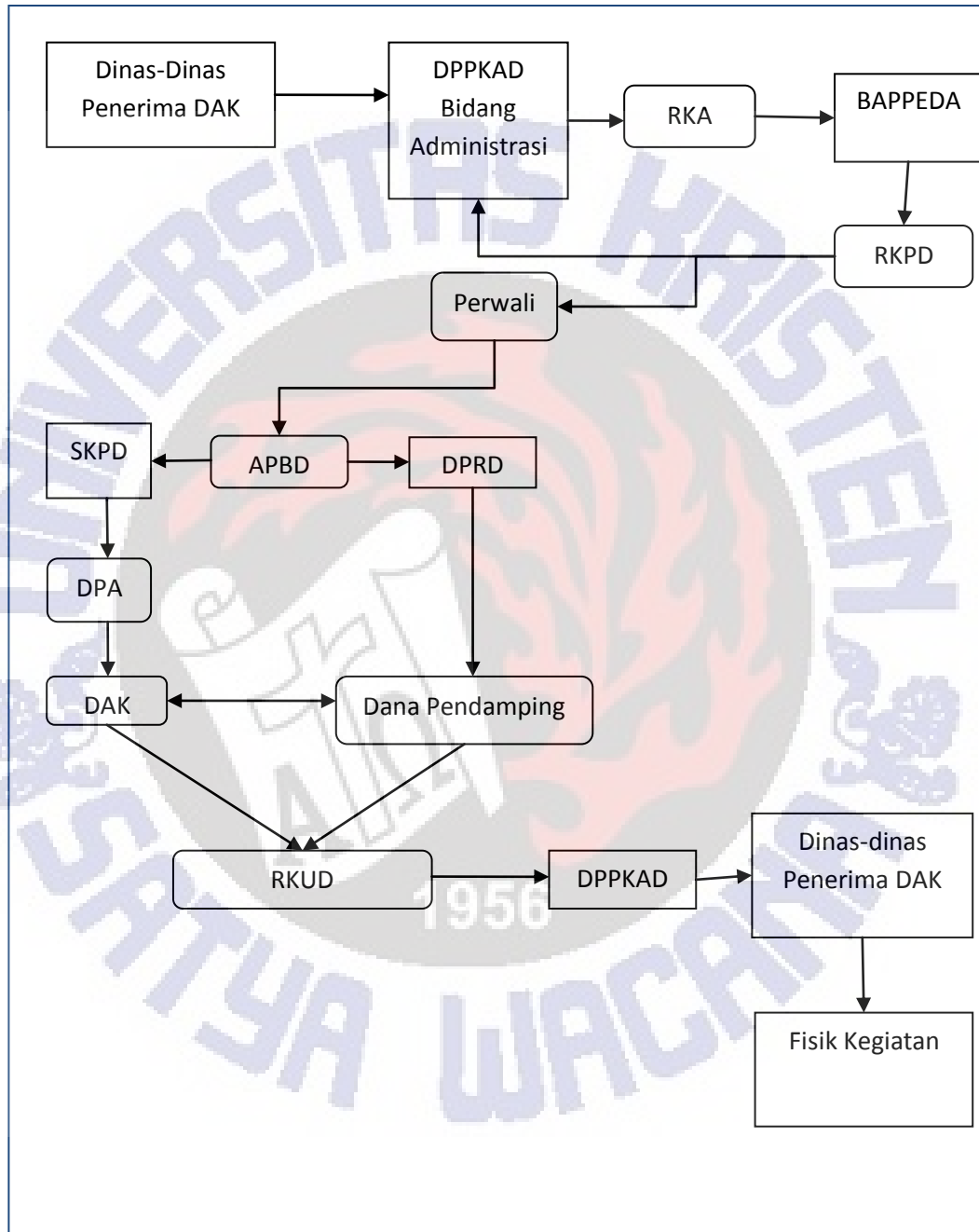


WALIKOTA SALATIGA

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2012

| No | Bidang | Sisa DAK Tahun 2012 | Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum (Melalui SP2D Daerah) | Sisa di Kasda |
|--------|--------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 - 4) |
| 1 | Pendidikan SD | 4.254.130.000 | 0 | 4.254.130.000 |
| 2 | Pendidikan SMP | 1.704.450.000 | 0 | 1.704.450.000 |
| 3 | Kesehatan Pelayanan Dasar | 222.619.000 | 0 | 222.619.000 |
| 4 | Kesehatan Pelayanan Farmasi | 2.305.614 | 0 | 2.305.614 |
| 5 | Kesehatan Pelayanan Rujukan | 13.280.000 | 0 | 13.280.000 |
| 6 | Infrastruktur Jalan | 29.327.273 | 0 | 29.327.273 |
| 7 | Infrastruktur Irigasi | 138.494.795 | 0 | 138.494.795 |
| 8 | Infrastruktur Air Minum | 194.532.663 | 0 | 194.532.663 |
| 9 | Infrastruktur Sanitasi | 13.330.000 | 0 | 13.330.000 |
| 10 | Kelautan dan Perikanan | 83.089.000 | 0 | 83.089.000 |
| 11 | Pertanian | 2.705.620.000 | 142.061.000 | 2.563.459.000 |
| 12 | Lingkungan Hidup | 24.338.000 | 0 | 24.338.000 |
| 13 | Keluarga Berencana | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kehutanan | 37.240.991 | 0 | 37.240.991 |
| 15 | Keselamatan Transportasi Darat | 6.833.000 | 0 | 6.833.000 |
| Jumlah | | 9.429.490.336 | 142.061.000 | 9.287.429.336 |

Gambaran Skema alur Perencanaan DAK di Pemerintahan Kota Salatiga, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian administrasi DAK di kantor DPPKAD.



**Tabel Realisasi Penyaluran DAK
(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan)**

| NO | Atribut | Realisasi di Lapangan | | Keterangan |
|----|---|-----------------------|-------|--|
| | | Ya | Tidak | |
| 1 | Penyaluran disalurkan dalam 3 tahap pertama 30%, kedua 45%, dan ketiga 25%. | x | | DAK di salurkan di setiap tahap satu 30%, bila memenuhi syarat akan ditransfer 45%, dan kemudian bila memenuhi syarat akan di transfer 25% nya lagi. |
| 2 | Penyaluran DAK tidak bisa dilakukan setelah satu tahun fiskal. | x | | DAK hanya berlaku satu tahun fiskal/ satu tahun anggaran |
| 3 | Penyaluran DAK dilakukan setelah dokumen yang diminta diterima DJPK. Penyaluran tahap pertama paling cepat adalah pada bulan Februari | x | | Dokumen akan diterima dahulu oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan baru setelah di setuju oleh DJPK tersebut baru DAK di transfer ke Daerah |
| 4 | Dokumen yang diserahkan: | | | |
| | Penyampaian Perda APBD | x | | Perda APBD diwajibkan untuk di berikan setiap kali mengajukan transfer DAK pada tahun anggaran yang baru |
| | Realisasi DAK dan laporan kegiatan DAK tahun lalu | x | | Laporan Realisasi DAK dan Kegiatan di tahun yang lalu wajib di berikan untuk melihat bagaimana pengelolaan DAK di lakukan di tahun sebelumnya |
| | DAK realisasi laporan tahap ketiga tahun lalu | x | | Laporan Realisasi DAK tahap ketiga wajib di ikut sertakan untuk pencairan DAK di tahun selanjutnya |
| | SP2D rekap pada tahap ketiga DAK tahun lalu | x | | Surat Perintah Pencairan Dana wajib di laporkan karena untuk DAK, dari RKUN ke RKUD harus dilaporkan setiap transaksi yang dilakukan |
| | Surat pernyataan untuk dana pendampingan DAK tahun berjalan. | x | | Karena di dalam peraturan, persyaratan penerimaan DAK harus di sediakan minimal 10% dari total DAK yang di terima |
| 5 | Dokumen yang diserahkan: | | | |
| | Laporan penyerapan DAK tahap pertama tahun berjalan | x | | Laporan DAK tahap pertama perlu di sertakan untuk menilai sejauh mana DAK dilaksanakan di tahap sebelumnya |
| | SP2D rekap DAK tahap kedua tahun berjalan. | x | | SP2D di perlukan untuk sebagai bukti pengambilan dan pengeluaran DAK |
| 6 | Dokumen yang di serahkan : | | | |
| | Laporan penyerapan DAK tahap kedua tahun berjalan | x | | Laporan DAK tahap Kedua perlu di sertakan untuk menilai sejauh mana DAK dilaksanakan di tahap sebelumnya |
| | SP2D rekap DAK tahap kedua tahun berjalan | x | | SP2D di perlukan untuk sebagai bukti pengambilan dan pengeluaran DAK |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 7 | Laporan penyerapan DAK tahap pertama dan tahap kedua dapat dilakukan setelah penggunaan dana DAK sama atau lebih dari 90% dari jumlah DAK yang telah diterima. | | x | Laporan Penyerapan DAK tahap pertama yang di terima dapat di realisasikan 90 % dari anggaran yang di transfer pada triwulan pertama, namun untuk tahap yang kedua seringkali realisasi tidak 90% dari anggaran yang di transfer pada triwulan kedua. Hal ini terjadi di tahun 2013 dan 2014 |
| 8 | Laporan penyerapan DAK tahap pertama dan kedua dapat disampaikan paling lambat 7 hari sebelum akhir tahun fiskal. Jika laporan disampaikan terlambat, maka sisa dana tidak akan ditransfer. | | x | Laporan Realisasi DAK setiap tahap harus di kirim 7 hari sebelum akhir triwulan, untuk tahap yang ketiga di laporkan setiap tanggal 19 Desember. Dinas sudah harus melaporkan kegiatan DAK tahap ketiga setiap tanggal 11 Desember |
| 9 | Semua dokumen prasyarat di kertas kop surat harus ditandatangani oleh kepala daerah dan dicap basah. Semua dokumen yang diserahkan harus dokumen asli yang ditambahkan dengan softcopy dari laporan excel | | x | Laporan Realisasi DAK nantinya akan di kirimkan dulu ke Pemerintah Pusat melalui Email, untuk pengecekan ulang di Pusat kegiatan - kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang di setujui Pusat, Kemudian jika di setujui, DPPKAD akan melaporkannya sendiri setiap dokumen ke Pemerintah Pusat di Jakarta. |